



UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI KEGIATAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

**(Studi pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten
Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

VIDYA IMANUARI PERTIWI
NIM. 135030507111007



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG

2017



MOTTO

KITA MUNGKIN SAJA TIDAK DAPAT MENEMUKAN JAWABAN YANG BENAR SETIAP SAAT

NAMUN, JANGAN PERNAH MENYERAH UNTUK BERTANYA

TENTANG MENGAPA KITA HIDUP DAN UNTUK APA KITA HIDUP

KARENA KETIKA KITA MENYERAH, MAKA ROMANTISME DALAM HIDUPMU AKAN BERAKHIR

(KIM SABU)

BERHENTILAH MEMBANDINGKAN, BERHENTILAH MENCELA,

BERHENTILAH Mencari KELEMAHAN DAN BERHENTILAH

BERKOMENTAR TENTANG KEHIDUPAN ORANG LAIN

MULAILAH BERSYUKUR, MULAILAH MENCINTAI DIRIMU DENGAN

TIDAK MELUKAI ORANGLAIN

(VIDYA IMANUARI PERTIWI)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hirabilamin puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas setiap kehadak dan pertolongan serta nikmat yang sudah dianugerahkan kepada saya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan setiap proses kehidupan dan setiap langkah pengerjaan skripsi saya. Tak lupa selawat serta salam saya ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Saya persembahkan skripsi ini kepada 2 orang motivator dan inspirator terbaik dalam perjalanan hidup saya, bapak poniman dan ibu nawang utari. Yang selalu setia berjuang demi saya, mendoakan saya, memberikan motivasi, pelajaran dan bertindak sebagai pendengar atas keluh susah saya. Terimakasih juga saya ucapkan terhadap adik tersayang saya Adam Imanuari Ramadan atas doa dan hiburannya selama ini. Terimakasih sebesar-besarnya atas kasih yang tak pernah usai kepada kedua orangtua saya dan adik tersayang saya atas setiap usaha yang dilakukan hingga akhirnya saya menyelesaikan penelitian dan bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi saya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi pada Desa
Kebontunggul Kabupaten Mojokerto)

Disusun Oleh : Vidya Imanuari Pertiwi

NIM : 135030507111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, September 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002



Nurjati Widodo, S.AP., M.AP
NIK. 830129 03 1 1 0275



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 November 2017
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Vidya Imanuari Pertiwi
Judul : Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi pada Desa
Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten
Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIK. 830129 03 1 1 0275

Anggota

Dr. Fadillah Amin, MAP, Ph.D
NIP. 19691205200501 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau



Vidya Imanuari Pertiwi, 2017, **Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)**. Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing (1) Drs. Heru Ribawanto, MS, (2) Nurjati Widodo, S.AP.,M.AP. 145 halaman+ xv

Upaya pemberdayaan menjadi sebuah arah, langkah, serta strategi untuk melatih dan mendidik masyarakat untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik pengetahuan serta kreativitas dan inovasi untuk kehidupan dirinya sendiri. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terdapat pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kegiatan yang akan menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memperbaiki kualitas pangan masyarakat. sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul, sehingga pelaku Kegiatan KRPL yang tergabung dalam Kelompok KRPL mampu untuk mengembangkan kegiatannya menjadi salah satu kegiatan yang memiliki prospek unggulan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan situs penelitian berada pada Kelompok KRPL yang ada di Desa Kebontunggul, serta Pemerintah Desa Kebontunggul dan BPTP Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles, Huberman dan Sadana yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan KRPL, yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul. Dari hasil penelitian ini, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan fasilitas pemberdayaan yaitu dengan pemberdayaan permodalan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KRPL ini memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertanian dan Desa Kebontunggul yang sering dijadikan kunjungan. Sedangkan hambatannya adalah rendahnya sumber daya manusia dan pemasaran.

Kata Kunci: Upaya Pemberdayaan, Kegiatan KRPL, Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Kebontunggul, BPTP Provinsi Jawa Timur.

SUMMARY



Vidya Imanuari Pertiwi, 2017, **Village Community Empowerment Efforts through Activity of Sustainable Food House Area** (Research at Kebontunggul, Sub district of Gondang, Mojokerto Regency). Thesis of Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences. Lecturers (supervised by) : (1) Drs. Heru Ribawanto, MS, (2) Nurjati Widodo, S.AP.,M.AP. 145 pages+ xv

Efforts to empower has become a direction, steps, and strategies, to train and educate the community, to be able develop the potentials whether knowledge, creativity, or innovation for life. The activities of Sustainable Food House (KRPL) that located in Kebontunggul Village, Gondang Sub-district, Mojokerto, is one of the village activities that will grow the economy in society and improve the food quality of the community. It should be implemented by government, in this case is Agricultural Technology Assessment Center (BPTP) of East Java and the Government of Kebontunggul Village. So that perpetrators of KRPL activities that incorporated in the KRPL group are able to develop their activities into one of the leading activities.

This research is using qualitative method with descriptive approach. The location of the research are located in the KRPL Group in Kebontunggul Village, the Government of Kebontunggul Village, and BPTP of East Java Province. This research is made through observation, interview, and documentation steps. Data analysis model that used in this research is data analysis model by Miles, Huberman and Sadana, consisting of data reduction, data presentation and making the conclusion.

The results of this research is to discuss the efforts of village community empowerment through KRPL activities, conducted by the government through BPTP of East Java Province and the Government of Kebontunggul Village. From the results of this research, BPTP East Java Province and the Government of Kebontunggul Village have provided empowerment facilities, there are empowerment of capital, human resources, and marketing. In the effort of community empowerment through KRPL activity, has several supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors of community empowerment are geographical conditions that support agricultural activities, and the Kebontunggul Village area where is oftenly used as a visiting place. While the inhibiting factors are the lack of human resources and marketing activities.

Keywords: Effort, Empowerment, KRPL Activities, Village Community, Government of Kebontunggul Village, BPTP East Java Province.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Studi pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada minat Ilmu Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc. selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto MS dan Bapak Nurjati Widodo S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan membantu selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Seluruh Keluarga Besar BPTP Provinsi Jawa Timur atas kerjasama dan bantuannya selama penelitian berlangsung.
7. Pemerintah Desa Kebontunggul dan seluruh Masyarakat Desa Kebontunggul atas kerjasama dan arahan, dampingan hingga memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
8. Kedua orang tuaku, adiku tersayang Adam Imanuari Ramadhan serta Keluarga Besarku yang telah memberikan doa, semangat serta saran.



9. Sugeng Setyo Widodo, atas setiap doa, semangat serta perhatian hingga bantuan baik moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Cinderella Squad (Fitria Eka Lestari, Tiya Arum, Uty Subahanin, Resa Triastuti dan Grasele Melinda), Ahmad Rizal Habibi, yeppo yeoja (Anzila Firizka, Hilyatul Afkar dan Vivi Anita), serta Innarti Nur Rizki, kemudian adik-adik D'Rawis yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2013 serta Keluarga Besar LPTP FIA UB yang sudah pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, September 2017

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Administrasi Publik.....	17
C. Desa.....	19
1. Pengertian Desa	19
2. Pemerintah Desa	20
3. Kewenangan Desa.....	20
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
1. Pengertian Pemberdayaan.....	23
2. Tujuan Pemberdayaan.....	25
3. Tahap-tahap Pemberdayaan	27
4. Strategi Pemberdayaan.....	29
5. Upaya Pemberdayaan.....	30
6. Hambatan Pemberdayaan Kawasan Rumah Pangan Lestari	32
E. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	33
1. Dasar Hukum KRPL	33
2. Pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	34
3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	36
4. Penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37



B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data	45
H. Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Penyajian Data Umum	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto.....	49
a. Visi dan Misi	49
b. Kondisi Geografis dan Administratif	53
c. Topografi	55
d. Demografi.....	57
2. Gambaran Umum Desa Kebontunggul.....	59
a. Sejarah	59
b. Geografis dan Topografi Desa	60
c. Demografi.....	63
d. Kondisi Sosial dan Ekonomi	64
3. Gambaran Umum Pemerintah Desa Kebontunggul.....	66
a. Visi dan Misi	66
b. Susunan Organisasi	69
4. Gambaran Umum Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.....	71
a. Visi dan Misi	71
b. Tugas Pokok dan Fungsi	72
B. Penyajian Data.....	74
1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebontunggul Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari	74
a. Permodalan	74
b. Sumber Daya Manusia	83
c. Kemampuan Pemasaran	91
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.....	97
a. Faktor Pendukung.....	97
b. Faktor Penghambat.....	104
C. Analisis Data	112
1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebontunggul Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari	113
a. Permodalan	114
b. Sumber Daya Manusia	119
c. Kemampuan Pemasaran	125
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebontunggul Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari	128
a. Faktor Pendukung.....	128



b. Faktor Penghambat..... 133

BAB V PENUTUP..... 136

A. Kesimpulan..... 136

B. Saran..... 140

DAFTAR PUSTAKA..... 143

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Pada Tahun 2013 – 2016.....	2
2	Pembagian Luas Wilayah Desa Kebontunggul	7
3	Penelitian Terdahulu	14
4	Rincian Luas Kabupaten Mojokerto	53
5	Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Tahun 2015.....	55
6	Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan	56
7	Jumlah Penduduk Tahun 2012-2014.....	57
8	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014.....	58
9	Tinggi dan Luas Daerah Menurut Dusun	61
10	Jumlah Penduduk Tahun 2013 menurut Jenis Kelamin per Dusun.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	45
2	Peta Administratif Kabupaten Mojokerto	54
3	Peta Administratif Desa Kebontunggul	62
4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebontunggul.....	70
5	Struktur Organisasi BPTP Provinsi Jawa Timur.....	73
6	Bantuan BPTP Provinsi Jawa Timur Untuk Kegiatan KRPL	77
7	Struktur Organisasi Kelompok KRPL.....	79
8	Pendidikan dan Pelatihan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur	84



Daftar Lampiran

Lampiran Judul

1. Dokumentasi Kegiatan KRPL Desa Kebontunggul
2. Dokumentasi Hasil Penelitian
3. Data Pinjam Modal Kelompok KRPL
4. Pedoman Wawancara
5. Surat-surat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk kesatuan. Wilayah Indonesia sendiri dikenal subur sehingga memiliki kondisi yang sangat mendukung kegiatan pertanian dan bercocok tanam. Kemudian Indonesia juga tergolong kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya alam tersebut meliputi lahan yang subur, kandungan-kandungan yang tergolong bahan tambang, kemudian ada juga minyak dan gas buminya. Menurut Wastutiningsih (2012:69) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara nomor tiga di dunia yang mempunyai keanekaragaman sumber daya, oleh karena itu Indonesia memiliki sumber kekayaan yang sangat besar untuk ketahanan pangan, air, energi dan lain-lain. Namun kekayaan sumber daya di Indonesia tidak menjadikan jaminan akan kemajuan perekonomian di Indonesia.

Terlepas dari segala kekayaan yang dimilikinya, Indonesia memiliki permasalahan diantaranya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut salah satu penyebabnya ialah pengangguran dan pendapatan masyarakat yang belum mencukupi kebutuhan pokok. Sedangkan penyebab kemiskinan dari prespektif ekonomi diungkapkan oleh Kuncoro (2003:131) yang dapat diidentifikasi menjadi 3 hal, yaitu 1) dari sudut pandang mikro, terkait dengan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan timpang, 2) kemiskinan yang didasari pada perbedaan kualitas sumber daya, 3) kemiskinan yang muncul akibat



perbedaan akses modal. Penuntasan kemiskinan sendiri menjadi dilema bagi pemerintahan di Indonesia. Pada dasarnya penuntasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” sehingga kemiskinan akan selalu menjadi salah satu prioritas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan data dari BPS yang memang menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia berada pada wilayah Pedesaan. Sehingga bisa dimengerti apabila sering kali masyarakat miskin di Indonesia dikenali sebagai masyarakat Desa. Untuk perbandingan jumlah penduduk miskin kota dan desa wilayah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Pada Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
2013	1.631.10	3.261.91	4.893.01
2014	1.531.89	3.216.53	4.748.42
2015	1.571.15	3.204.82	4.775.97
2016	1.552.77	3.085.76	4.638.53

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2016

Sesuai dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang ada pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2016 masih didominasi pada wilayah pedesaan. Pada dasarnya salah satu faktor yang membuat kemiskinan yang begitu besar adalah kurangnya pengaktualisasi diri sehingga membuat apa yang menjadi potensi dari masyarakat pedesaan kurang terolah dan tersalurkan dengan baik.



Desa Kebontunggul merupakan salah satu Desa unggulan yang terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Kategori desa unggulan yang didapat pemerintah desa kebontunggul disebabkan oleh perintisan zona ekonomi kreatif yang berfokus pada pertanian dan peternakan. Namun disamping itu kondisi masyarakat Desa Kebontunggul mengharuskan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan. Kemiskinan di Desa Kebontunggul disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah Penghasilan rendah yang belum mencukupi kebutuhan dasar, produk unggulan belum terlembaga secara representatif, kemudian petani masih membutuhkan bimbingan dan fasilitas pola tanam dan infrastruktur yang baik, srta Usaha Mikro masih terkendala modal, kurangnya informasi pemasaran dan kurang keahlian dalam bidangnya (RPJMDes Kebontunggul 2013-2019).

Terlepas dari permasalahan sosial ekonom tersebut, pemerintah Desa Kebontunggul secara berkelanjutan membuktikan sepak terjang Desa Kebontunggul sebagai desa unggulan yaitu dari piagam penghargaan tahun 2012 terkait dengan pemenang terbaik 1, dalam pelaksana 10 kegiatan pokok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian pemerintah Desa Kebontunggul memberikan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif khususnya para wanita. Kemudian secara aktif Pemerintah Desa Kebontunggul mengatasi ketidakberdayaan masyarakat Desa Kebontunggul dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Pembangunan pedesaan sudah seharusnya diarahkan pada penguatan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Salah satu



caranya adalah dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya pemberdayaan memang sudah menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah. Hal itu tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sedangkan makna dari pemberdayaan sendiri, menurut Tim Deliveri (2004) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:76) yang menyatakan bahwa “pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin”.

Selanjutnya menurut Persons,et,al.,1994 (dalam Suharto,2010:58-59) bahwa:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) terutama terkait dengan pola pikir dan prilaku dari masyarakat sendiri sehingga akan mampu untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik dan berkualitas. Kemudian pemberdayaan juga bisa diarahkan pada pemberian akses permodalan serta bantuan pemberian peralatan guna mengaktualisasi kemampuannya. Secara khusus pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan. Hal tersebut terjadi mengingat pentingnya peran dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan akan berfungsi pada keberdayaan masyarakat, masyarakat yang awalnya tidak berdaya akan mampu untuk berdaya dan mandiri. Sehingga dampak besarnya dari



pemberdayaan ialah perbaikan kesejahteraan masyarakat. dalam proses pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya fungsi pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat atau yang bisa disebut dengan fasilitator, untuk itu sudah seharusnya pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif dimana masyarakat mampu mengembangkan potensinya secara optimal.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas pemberdayaan. Fasilitas pemberdayaan tersebut merupakan strategi dalam rangka mencapai kegiatan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan bisa diberikan fasilitas-fasilitas berupa perbaikan permodalan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan untuk menambah ekonomi masyarakat bisa dilakukan pada aspek pemasaran. Upaya pemberdayaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu juga menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut misalnya Indra Hadi Prasetyo Tahun 2010 melakukan penelitian upaya pemberdayaan dengan fokus pada pengembangan SDM, teknologi produksi serta pemasaran. Sedangkan Wijaya Azmi Tahun 2011 memberikan upaya pemberdayaan dengan fokus akses modal usaha, peningkatan SDM dan akses pada sarana dan prasarana.

Upaya pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL sendiri merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2014:9). Prinsip dari pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu memanfaatkan pekarangan rumah kemudian dirancang untuk



memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang akan berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari ialah bersumber dari strategi pemerintah untuk melakukan penganeekaragaman konsumsi pangan.

Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu kegiatan yang muncul akibat dari kebijakan diverivikasi pangan. Sedangkan dasar hukum pembentukan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berasal dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kemudian dilakukan tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Kementerian Pertanian pada tahun 2013 juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan beserta Pedoman Pelaksanaan P2KP dan Pedoman Umum KRPL tahun 2015 sebagai bentuk keseriusan pencaanangan kegiatan KRPL.

Kawasan Rumah Pangan Lestari seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan salah satu kegiatan sebagai dampak dari program diverivikasi pangan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian. Dalam pelaksanaanya pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian memberikan kewenangan melaksanakan kegiatan KRPL kepada instansi vertikal Kementria Pertanian yang ada di daerah yaitu BPTP atau yang dikenal dengan Balai Pengkajian Teknologi



Pertanian. Dalam pelaksanaan KRPL di Desa Kebontunggul pada dasarnya memiliki 2 aktor yang bergerak dalam pemberdayaan melalui kegiatan KRPL ini yaitu BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul.

Keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari disambut baik oleh pemerintah Desa Kebontunggul. Perintisan dan pelaksanaan kegiatan KRPL BPTP tidak sendiri melainkan bekerjasama dengan pemerintah desa Kebontunggul. Pemerintah Desa Kebontunggul juga menjadikan pemberdayaan sebagai salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. upaya pemberdayaan masyarakat terlihat melalui RPJM-Des dari Desa Kebontunggul yang tertuang dalam misi yang dibawa Pemerintah Desa Kebontunggul yaitu “mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan peran aktif masyarakat terhadap pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sedangkan arah kebijakan yang menyangkut pemberdayaan lebih mengarah pada sektor agroindustri dan agrobisnis. Hal tersebut nampak wajar apabila melihat aspek geografi dari wilayah Desa Kebontunggul itu sendiri yang didominasi Pertanian dan Tegalan. Untuk pembagian luas wilayah Desa Kebontunggul dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2
Pembagian Luas Wilayah Desa Kebontunggul Kisaran Tahun 2013-2019

Pemukiman	22.400 Ha
Pertanian	142.220 Ha
Tegalan	73.615 Ha
Fasum (Fasilitas Umum)	24.980

Sumber: RPJM-Desa Kebontunggul 2013-2019

Upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah desa Kebontunggul salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah masyarakat sebagai area pertanian atau yang dikenal dengan KRPL. Sedangkan fasilitas pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yaitu KRPL antara lain, melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kemudian akses permodalan, serta terkait dengan pemasaran dari KRPL itu sendiri. Realisasi kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Kebontunggul sudah dijalankan sesuai aturan. Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Kebontunggul telah mencakup pembuatan *green house* dan kebun bibit sayur dan buah, kemudian pemanfaatan tanah pekarangan rumah warga dan pengembangan sistem integrasi tanaman ternak dan ikan (RPJM-Des Kebontunggul) serta pengolahan hasil KRPL menjadi makanan yang siap makan. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diterapkan pada Desa Kebontunggul pada dasarnya memiliki aktor yang diberdayakan diluar aktor yang memberdayakan, yaitu Kelompok Wanita Tani. Hal tersebut sesuai dengan arah dari kegiatan KRPL itu sendiri yaitu untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita serta membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) (Draf Pedoman P2KP, 2015:2). Upaya pemberdayaan pemerintah melalui kegiatan KRPL memang sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada juga keseriusan baik dari pemerintah melalui BPTP, Pemerintah desa, masyarakat maupun lembaga terkait. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kendala-kendala serta masalah tetap dapat ditemukan. Kendala terkait dengan upaya pemberdayaan tersebut seperti

kurangnya semangat dari masyarakat untuk menjaga KRPL itu sendiri, kemudian pemahaman dari masyarakat terkait dengan pemasaran, Dsb.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait upaya pemberdayaan pada masyarakat desa di

Desa Kebontunggul, karena melihat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah Desa Kebontunggul dan atas prestasi yang diterima

Desa Kebontunggul hingga memiliki predikat Desa unggulan Kabupaten

Mojokerto namun memiliki permasalahan dalam pengembangannya. Untuk itu sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

tentang **“UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI**

KEGIATAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (Studi pada Desa

Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas terbatas pada upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kebontunggul melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Desa Kebontunggul?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui KRPL yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul.
2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang nantinya akan berkontribusi baik secara akademis maupun praktik, yang meliputi :

1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini dikatakan sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa dalam menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran untuk memperdalam teori tentang pemberdayaan masyarakat desa, serta analisis faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan pemerintah desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).



2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah desa khususnya BPTP Provinsi Jawa Timur dan pemerintah desa Kebontunggul Kabupaten Mojokerto serta sebagai bahan informasi dan masukan bagi BPTP Provinsi Jawa Timur dan pemerintah desa Kebontunggul dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan garis besar penelitian tentang upaya pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: latar belakang beserta alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan pembahasan serta analisis. Tinjauan pustaka berisi teori mengenai: Administrasi Publik, Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Tinjauan Pustaka diambil dari berbagai literatur yang sesuai baik dari jurnal dan buku-buku terkait.



BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam bab ini memuat tentang fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data dan analisis data, instrumen penelitian dan keabsahan data. Untuk lokasi penelitian dilakukan pada Desa Kebontunggul dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Timur. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekundr. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum dan penjelasan dari hasil penelitian. Seperti gambaran umum Kabupaten Mojokerto dan Desa Kebontunggul. Pembahasan yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan terkait dengan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan ada juga saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis dari masalah-masalah yang diuraikan dalam penelitian untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber serta referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Dalam pemilihan penelitian terdahulu, diambil yang sesuai dengan judul dan fokus dari penelitian ini. Fungsi dari mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian ini, adalah untuk dapat membuktikan bahwa metode serta fokus penelitian yang digunakan saat ini pernah digunakan untuk melakukan pengujian alam suatu penelitian. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada data yang diperoleh nantinya, akan mengarah pada data yang valid.

Untuk melihat upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan kawasan rumah pangan lestari dapat diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang sesuai dan mendukung dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dengan rincian dari penelitian terdahulu terkait nama dan tahun penelitian, judul penelitian, metode dan fokus penelitian yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penulisan	Judul Penelitian	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Indra Hadi Prasetyo, 2010.	Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. ➢ Penelitian ini memiliki fokus penelitian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya dinas perindustrian dan perdagangan kota malang dalam rangka memberdayakan industri kecil, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sumber daya manusia. b. Pengembangan teknologi produksi. c. Promosi pemasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi aspek diklat (pendidikan dan pelatihan dan <i>studybanding</i>. Pembinaan manajerial memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait <i>managerial skill</i>. Pengembangan teknologi dengan memberikan bantuan permodalan. Promosi pemasaran melalui pameran. Dan pembinaan permodalan. 2) Faktor pendukung meliputi sudah terkenalnya kualitas keramik dinoyo di masyarakat dan adanya paguyuban kelompok pengrajin.

			<p>d. Pembinaan permodalan</p> <p>2) Faktor pendukung dan penghambat</p>	<p>Sedangkan faktor penghambatnya adalah permodalan dan bahan baku yang sulit serta mahal</p>
2.	Wijaya Azmi, 2011.	<p>Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Program Nasional Pemberayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura)</p>	<p>➢ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.</p> <p>➢ Penelitian ini memiliki fokus penelitian antara lain:</p> <p>1) Pemberdayaa masyarakat miskin melalui peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses sumber daya manusia, peningkatan akses sarana dan prasarana.</p> <p>2) Manfaat pemberdayaan masyarakat miskin.</p>	<p>1) Hasil penelitian menunjukkan melalui peningkatan bantuan modal, akses sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dikatakan berhasil namun belum dapat berjalan secara maksimal</p> <p>2) Memberikan manfaat pada perubahan ekonomi masyarakat.</p> <p>3) Faktor penghambat, antara lain:</p> <p>a. Kurangnya kesadaran warga terkait pengembalian pinjaman.</p> <p>b. Kurangnya pengertian warga tentang pemuatan dan pelaporan proposal kegiatan.</p>

			<p>3) Faktor pendukung dan penghambat.</p>	<p>sedangkan faktor pendukungnya adalah keterampilan otodidak masyarakat dan anggaran dana yang mendukung.</p>
3.	Trisnawati Tri Adinda, 2016.	<p>Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sebagai Wujud Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Studi di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. ➢ Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pemberdayaan kelompok wanita tani sebagai wujud kegiatan KRPL dan faktor yang mendukung serta menghambat dalam melaksanakan kegiatan KRPL. 	<p>1) Upaya pemberdayaan yang dilakukan meliputi penguatan ketersediaan cadangan pangan, perlindungan penganekaragaman pangan. Perlindungan penganekaragaman konsumsi, penyokongan pendapatan keluarga dan pemeliharaan kualitas gizi keluarga.</p> <p>2) Faktor pendukung adanya penyuluh dan faktor ekonomi serta estetika. Sedangkan faktor penghambat adalah gangguan hama dan rendahnya kualitas SDM.</p>



B. Administrasi Publik

Arti kata administrasi sendiri berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Makna kata dari *to administer* bisa juga disamakan dengan *to manage* yang berarti mengelola serta *to direct* yang berarti menggerakkan. Sedangkan kata “publik” berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu “*public*” yang memiliki makna orang banyak, masyarakat umum atau rakyat umum. Sedangkan pengertian dari administrasi publik menurut Chandler dan Pleno dalam Indarti (2012:113) bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Pada dasarnya administrasi publik bisa merujuk pada gabungan antara teori dan praktek yang didalamnya telah dikombinasikan dengan proses manajemen dan pencapaian nilai-nilai yang dianut pada masyarakat secara umum. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Nicholas Henry (Keban, 2004:5) bahwa :

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan secara baik.

Pemerintahan tidak bisa dilepaskan dalam perkembangan keilmuan berkaitan dengan administrasi. Administrasi sebagai pemerintahan ditemukan dalam kepustakaan politik Amerika Serikat. Sebagai contoh kata “*The Administration*” yang memiliki arti keseluruhan pemerintahan termasuk presiden. Terkait dengan



administrasi sebagai pemerintahan dikemukakan oleh Utrech dalam Sjamsiar (2006:12) bahwa administrasi adalah gabungan yang dibawah jabatan pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada negara.

Sedangkan menurut Piffner dan Presthus dalam Pasolong (2007:7) memberikan definisi terkait dengan administrasi publik, sebagai berikut :

- a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Beberapa definisi berkaitan dengan administrasi publik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses *manage* atau *direct* untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pemerintah juga dengan menggunakan kerjasama yang dilakukan dengan sekelompok orang atau lembaga juga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat umum secara efisien dan efektif. Sedangkan dalam konteks pemerintahan isitilah dari administrasi publik juga merupakan istilah yang sering digunakan. Dengan ruang lingkup mencakup ilmu sosial yang memiliki objek materinya adalah negara.



B. Desa

1. Pengertian Desa

Indonesia terlahir dengan kondisi masyarakat yang beragam, dengan banyak perbedaan kebudayaan serta potensi yang membawa Indonesia kedalam suatu kondisi yang beragam dan unik. Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat yang masih sangat lekat akan potensi yang murni sehingga patut untuk dikembangkan dan dijaga.

Hal tersebut membawa pemerintah Indonesia untuk membentuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum Desa itu sendiri.

Sedangkan untuk pengertian tentang desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut Antonius T (2003) dalam Wahjudin Sumpeno (2013:3) menjelaskan terkait Desa bahwa :

“istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa.

Lebih lanjut mengenai desa dapat diketahui dari asal istilah desa itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut diungkapkan oleh Yayuk dan Mangku (2003) dalam Wahjudin

Sumpeno (2011:3) bahwa “istilah desa berasal dari bahasa India, *swadesi* yang berarti



tempat asal, tempat tinggal, negeri asak atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 M Silahudin menjelaskan terkait dengan pengertian tentang desa (2015:11) bahwa “desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). dengan begitu sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*).

2. Pemerintahan Desa

Otonomi desa diberikan kepada pemerintah desa sebagai implementator atau pelaksana dari kewenangan otonomi itu sendiri. Sedangkan penyebutan istilah penyelenggaraan terkait dengan urusan desa disebut dengan pemerintahan desa.

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan terkait dengan pengertian dari pemerintahan desa dan pemerintah desa itu sendiri bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan makna dari pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Kewenangan Desa

Penyelenggaran pemerintah desa memiliki dua azas utama yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Dalam hal ini azas yang dipakai dalam pemerintahan desa sendiri



berbeda dengan pemerintahan daerah yang berazaskan desentralisasi serta residualitas. Sebagai bentuk dari kombinasi antara dua azas penyelenggaraan pemerintahan desa menghasilkan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut juga sebagai bentuk pemberian otonomi desa. Berkaitan dengan kewenangan yang merupakan salah satu elemen penting atau merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Berkaitan dengan pengelompokan kewenangan yang dimiliki oleh desa diungkapkan M Silahuddin (2015:12) bahwa kewenangan desa meliputi :

“kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa”.

Kemudian melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19 dan 103 menjelaskan terkait dengan kewenangan yang dimiliki Desa dan Desa Adat yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan lokal berskala desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.



Desa mendapatkan otonomi atas pertimbangan keunikan atau kearifan lokal yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah desa mendapatkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal sebagai hasil penghormatan serta pandangan kearifan lokal harus selalu dijaga dan dikembangkan. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 menjelaskan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa memang sudah sepatutnya untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut mengingat pemberdayaan masyarakat juga masuk dalam kewenangan lokal berskala desa. Untuk kewenangan lokal berskala desa sendiri menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 meliputi “bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 14 menjelaskan terkait Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain :



- a. Pengembangan seni budaya lokal.
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani.
 - 2) kelompok nelayan.
 - 3) kelompok seni budaya.
 - 4) kelompok masyarakat lain di desa.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian awal pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang mempunyai arti kekuatan atau kemampuan. Kemudian kata berdaya dalam bahasa Indonesia yang berarti suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Kemudian dalam bahasa Inggris pemberdayaan juga berarti *empowerment* atau yang memiliki terjemahan memberdayakan, sedangkan kata *empower* menurut Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Hutomo (2000) mengandung 2 pengertian, sebagai berikut :

- 1) *to give power* atau *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
- 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.



Makna pemberdayaan yang berarti kekuatan atau *power* apabila dalam bahasa Inggris juga diperkuat dengan pendapat dari oleh Bakri (2010:17) yang menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengatualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terlepas dari perangkap kemiskinan maupun keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang ekonomi.”

Selanjutnya pengertian dari pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:47) mengungkapkan bahwa:

“pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan “,

Menurut Kertasasmita (1996) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:48) menyatakan pemberdayaan adalah :

“Upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya”.

Pemberdayaan masyarakat bisa dijadikan sebagai strategi dalam pembangunan. Hal tersebut akan membawa dampak pada memunculkan kemandirian serta potensi yang awalnya terkubur dalam masyarakat. Kemudian pemberdayaan



juga sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan *upgrading* dan dapat menikmati hasilnya secara optimal. Jadi kesimpulan dari pengertian pemberdayaan itu sendiri mencakup pada usaha yang dilakukan pihak lain untuk memberdayakan pihak yang lain bisa diartikan sebagai usaha pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga potensi yang ada dalam masyarakat mampu untuk dikelola secara optimal dengan langkah-langkah yang positif dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Perempuan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan. Dahulunya seringkali perempuan hanya digolongkan pada orang yang hanya bisa bekerja di dalam rumah. Sehingga perempuan sendiri seringkali dikategorikan sebagai kelompok yang tidak berdaya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Sadan (2004:98) bahwa saat ini banyak organisasi pemerintah yang melakukan usaha pemberdayaan agar kelompok yang dikategorikan tidak berdaya untuk mampu berdaya, sedangkan untuk kelompok yang dapat dikategorikan tidak berdaya ialah orang yang lanjut usia, anak-anak, dan penyandang cacat, serta perempuan.

Pemberdayaan yang dimaksud untuk perempuan bukan dalam pengertian untuk mendominasi orang lain atau laki-laki melainkan hal tersebut lebih mengarah pada peningkatan kemampuan wanita untuk mandiri, pengembangan dan penguatan daya atau potensi. Sedangkan alasan yang mendukung pemberdayaan perempuan diungkapkan oleh Duflo (2012) yang pertama, ketidaksetaraan gender pada dirinya sendiri tidak diinginkan dari sudut pandang hak asasi manusia. Kedua, perempuan



dianggap memainkan peranan penting dalam pengembangan, oleh karena itu pemberdayaan akan membawa hasil-hasil sosial yang lebih luas.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bisa dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga hasil akan diperoleh secara maksimal. Disini pemberdayaan juga bisa dilakukan sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan. Apabila potensi yang ada mampu diberdayakan akan menumbuhkan keuntungan yang akan berimbas pada masyarakat itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Mardikanto dan Soebianto (2012:29) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi pemberdayaan adalah usaha atau upaya agar masyarakat mampu dan mandiri. Untuk itu Mardikanto dan Soebianto (2012:111) memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dari pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan antara lain:

a. Perbaikan pendidikan

Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai sesuatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembang semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber



informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.

d. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan tindakan/kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

e. Perbaikan usaha

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan pendapatan

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

g. Perbaikan lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaikan masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dalam suatu pemberdayaan diperlukan adanya pembelajaran sebagai bentuk praktek dari kegiatan pemberdayaan. Pembelajaran bertujuan memberikan

bimbingan, pendidikan dan keterampilan-keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan Fahrudin (2011: 75) yang

menguraikan bahwa dalam prinsip-prinsip pemberdayaan mengandung pembelajaran-

pembelajaran yang dilakukan dalam pemberdayaan. Pendekatan pembelajaran dalam

pemberdayaan antara lain:



- a. Pelatihan dan bimbingan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan ilmu sosial, ekonomi, politik, dan alam sekitar.
- b. Pembelajaran dan pelatihan keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lingkungan.
- c. Pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu membawa suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik.

3. Tahap-tahap Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan memang membutuhkan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui. Sedangkan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:82) sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dari poin tersebut dimaksudkan bahwa pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diinterfensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat langsung merangsang keadaan mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan agar mampu terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Pada poin ini dimaksudkan bahwa proses transformasi pengetahuan, kecakapan, keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif. Jika tahap pertama lebih terkondisi, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan mereka yang membutuhkan. pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang terendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pada poin ini dimaksudkan bahwa tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan.



Supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan-pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Dalam hal ini pemerintah tinggal sebagai fasilitator saja.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya pemerintah yang harus tetap direncanakan secara serius dan harus berfokus pada upaya pengembangan potensi dari masyarakat itu sendiri. Juga terkait dengan kemandirian masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari pemberdayaan juga harus selalu ditekankan dan upaya pemberdayaan untuk kemandirian harus terus dilaksanakan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu proses yang memiliki tahap-tahap dan berkesinambungan satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang mandiri yang mampu mengelola potensi yang ada secara optimal.

4. Strategi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012: 167) menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Mardikanto dan Soebianto (2012: 167) menyatakan strategi diartikan dengan beberapa pendekatan, seperti:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana, sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan



strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dilakukan oleh (para) pesaingnya.

- 2) Strategi sebagai kegiatan, sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen, sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan/ perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.
- 4) Strategi sebagai suatu sistem, sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan telah ditetapkan.
- 5) Strategi sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk “menutup” kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman-ancamannya.

Selanjutnya menurut Ismawan yang dikutip oleh Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2012: 170) menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok;
- 3) Pemupukan modal masyarakat;
- 4) Pengembangan usaha produktif;
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.

Makna kemandirian sendiri mengacu pada kemampuan memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang di pandang tepat dalam memecahkan masalah. Kemudian dalam mencapai suatu kemandirian tersebut membutuhkan sebuah proses. Pada dasarnya pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari peningkatan ekonomi keluarga sendiri. apabila perempuan dalam keluarga bisa berdaya akan



berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Misalnya melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari ini dengan fokus sasaran pada perempuan, apabila konsep ini mampu diaplikasikan dengan baik oleh perempuan dalam keluarga akan mampu membawa dampak yang baik pula untuk keluarga.

5. Upaya Pemeberdayaan

Pemberdayaan yang dapat tumbuh dengan baik, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. oleh sebab itu diperlukan suatu upaya tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004:40) yang menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan adalah:

- a) Bantuan dana sebagai modal usaha.
- b) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat.
- c) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.
- d) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
- e) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Upaya pemberdayaan bukan hanya dalam peningkatan pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti usaha untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah serta masyarakat dalam bentuk pelatihan.

Menurut Kartasasmita (1996:159) bahwa memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Menciptakana suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan ahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan



sudah penuh. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain itu untuk menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

c) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Karena hal ini justru akan mmengerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atau usaha sendiri.

6. Hambatan Pemberdayaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Pelaksanaan pemberdayaan tidak akan lepas dengan hambatan dari pemberdayaan itu sendiri. Menurut Fahrudin (2009:18) tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam pemberdayaan. Pemberdayaan akan efektif apabila didukung dengan masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dan masyarakat yang mau untuk berpartisipasi didalamnya sehingga terjadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bhatnagar dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:106) bahwa prinsip pemberdayaan antara lain:



- a. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa Masyarakat atau Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam pemberdayaan. Sehingga rendahnya partisipasi dan rendahnya keinginan untuk melakukan perubahan menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan upaya pemberdayaan.

BPTP Provinsi Jawa Timur memetakan terkait hambatan dan peluang pemberdayaan Kegiatan KRPL (:33) antara lain:

- a. Sumber Daya Alam (SDA), suhu udara yang rendah, gangguan hama, dan polusi menyebabkan banyaknya tanaman dan ternak mati. Serta ketersediaan air merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM), ada empat kendala antara lain: waktunya tidak cukup karena mempunyai lahan yang luas selain di pekarangan, kekurangan tenaga kerja untuk memelihara 35 tanaman/ternak, motivasi menurun/jenuh dan pengetahuan terbatas terhadap teknologi pertanian tertentu. Dsb.
- Kegiatan KRPL adalah kegiatan yang diarahkan untuk penganekaragaman pola makan masyarakat. Selain itu juga untuk menambah pendapatan masyarakat, untuk itu pola pemberdayaan dari pemberdayaan usaha mikro diperlukan yaitu pemasaran. Namun pemasaran menjadi hambatan tersendiri bagi KRPL. Hambatan terkait dengan KRPL hampir serupa seperti yang dijelaskan oleh Tambunan (2002:73) terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil bahwa masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil antara lain masalah kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial, masalah keterbatasan sumber daya manusia dan masalah keterbatasan teknologi.

D. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)



1. Dasar Hukum KRPL

Sebagai upaya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan kebijakan tentang

P2KP atau yang dikenal dengan istilah Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi

Pangan. Dalam kebijakan tersebut salah satu Keegiatannya ialah pembentukan model

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sedangkan untuk landasan hukum P2KP

dengan Kegiatan KRPL antara lain :

1) Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-undang

Pangan Nomor 7 Tahun 1996.

2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan

Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya

Lokal.

4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan.

5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/ Permetan/

HK.140/ 4/ 2015 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi

Pangan Tahun 2015.

Terkait dengan dasar pelaksanaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL) dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian (2013:2) sebagai

berikut:



“Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) merupakan implementasi dari rencana strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. di tingkat Provinsi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub) dan ditingkat Kabupaten/Kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

2. Pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015 dapat dipahami terkait dengan pengertian dari Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL bahwa :

“Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat”.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah konsep penumbuhan dan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara diversifikasi yang berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam satu kawasan (BPTP Jatim, 2012). Terkait dengan prinsip utama KRPL adalah pengelolaan pekarangan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan,



diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan, dan menjaga kelestariannya melalui Kebun Bibit Desa (KBD), menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2011). Dari pendapat diatas kesimpulan terkait pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah suatu konsep dari pemerintah terkait pengelolaan pekarangan agar dimanfaatkan sebagai sumber pangan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan perempuan.

3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Tujuan dari pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat diketahui melalui Tujuan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah membantu mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok (Permentan, 2015:15)

Sedangkan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur (2012) menyatakan bahwa tujuan utama pengembangan KRPL adalah:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga.
- 2) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.
- 3) Meningkatkan pendapatan keluarga.
- 4) Meningkatkan kualitas gizi keluarga.

Berdasar tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dari Model KRPL ini adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan



sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera (Kementerian Pertanian, 2011). Sedangkan menurut Badan Ketahanan Pangan, Jawa Timur (2012:35) menyatakan terkait dengan sasaran Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK desa sebagai pelaku dan pengelola pekarangan.
- 2) Menumbuhkembangkan KBD dan sarana penunjang lainnya.
- 3) Meningkatkan peran Koperasi Wanita yang ada disetiap desa sebagai sumber permodalan penyedia agroinput dan pemesan hasil produksi segar maupun olahan.

4. Penerapan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pengembangan Rumah Pangan Lestari dikelompokan berdasarkan strata, yaitu strata 1 untuk lahan yang sempit, strata 2 untuk lahan sedang dan strata 3 untuk lahan luas. Sedangkan dalam penerapannya (Kementrian Pertanian, 2012:11-15) sebagai berikut:

- a. Strata 1 berupa rumah tanpa halaman yang merupakan warung. Tanaman yang dikembangkan adalah sayuran dalam pot/polibag yang diatur dalam vertikultur menggunakan rak dan bambu yang digantung di pagar.
- b. Strata 2 berupa rumah dengan pekarangan yang dimanfaatkan untuk penanaman sayuran, TOGA, dalam bedengan, dan vertikultur sayuran. Intensifikasi pagar untuk Rumah Pangan Lestari (RPL) di Perkotaan umumnya menyukai sayuran untuk pedesaan sebagian besar menggunakan tanaman untuk pakan ternak.
- c. Strata 3, komoditas yang dikembangkan lebih beragam. Pada pekarangan depan dapat dimanfaatkan untuk sayuran, tanaman obat keluarga dan tanaman buah. Perkarangan samping dimanfaatkan untuk kolam ikan dan sayuran secara bedengan. Sedangkan untuk pekarangan belakang dimanfaatkan untuk memelihara ayam atau tenak kambing serta tanaman buah.



Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), agar dapat berjalan baik dan sesuai harapan, maka diperlukan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya.

Mekanisme pengembangan KRPL dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- 1) Pembentukan kelompok.
- 2) Identifikasi kebutuhan.
- 3) Penyusunan rencana kegiatan.
- 4) Sekolah Lapang (SL) dan pelatihan
- 5) Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit.
- 6) Pengembangan demplot kelompok.
- 7) Penataan lingkungan Kawasan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini diambil dengan mempertimbangkan kesesuaian rumusan masalah yang akan diteliti sehingga hasil atau data yang diperoleh akan benar-benar relevan dengan kondisi yang ada. Metode kualitatif menurut Lexy J. Meleong berdasarkan pada potensi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data.

Metode penelitian deskriptif menurut Pasolong (2012:72) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan diatas memiliki kesimpulan adalah suatu penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan menganalisis sesuatu yang sedang terjadi atau ada sehingga mampu untuk dibuat penggambarannya yang dibuat secara relevan, sistematis, akurat dan berhubungan dengan masyarakat.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan fenomena yang ada pada lapangan, peneliti menggambarkan fenomena terkait upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh



pemerintah melalui BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Kemudian peneliti melakukan analisis terkait dengan hambatan serta kelebihan dari upaya pemberdayaan yang telah dilakukan dalam mewujudkan atau melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sendiri ialah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dijelaskan secara gamblang guna memberikan batasan pada pembahasan juga berguna untuk mempermudah dalam pengamatan serta pengambilan data. Hal tersebut dipertegas dengan pendapat dari Sugiyono (2009:285) bahwa dalam penelitian kualitatif yang memiliki permasalahan terlalu luas, maka peneliti dapat membatasi penelitian dalam satu variabel atau lebih. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif terdapat satu fokus yang disebut dengan batasan masalah.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, adapun yang akan menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut :

1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
 - a. Memberikan fasilitas pemberdayaan permodalan, baik permodalan yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Desa Kebontunggul.
 - b. Memberikan fasilitas pemberdayaan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan.



KRPL Desa Kebontunggul dan berada pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksudkan disini ialah sumber data yang digunakan dalam penelitian itu sendiri, yaitu orang-orang yang berkaitan, peristiwa, dan dokumen-dokumen yang dianggap mampu menunjang data dan penting dalam penelitian. Beberapa sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1) Informan

Peneliti mendapatkan data langsung dengan mewawancarai informan sebagai sumber yang menguasai dan memahami fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peneliti BPTP Provinsi Jawa Timur sebagai Penanggung Jawab KRPL Ibu Rika Asnita SP., M.Sc selaku pembimbing dan pendamping penyuluhan KRPL dan sebagai wakil dari organisasi yang menaungi KRPL.
- b. Kepala Desa Kebontunggul Bapak Siandi, SH., MM. Sebagai wakil dari organisasi yang menaungi masyarakat desa Kebontunggul dan sebagai perantara masyarakat dan BPTP serta pengembang KRPL Desa Kebontunggul.
- c. Ketua Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari Ibu Sa'diah. Sebagai pengawas pelaksanaan KRPL serta koordinator dari anggota kelompok KRPL.



d. 2 Anggota Kelompok KRPL. Sebagai pelaksana kegiatan KRPL

2) Peristiwa atau Fenomena

Peneliti memperoleh informasi selain dari informan yaitu dengan melalui peristiwa dan fenomena yang sesuai dan bermanfaat untuk mengungkapkan permasalahan fokus penelitian. Peristiwa yang diamati seperti kegiatan kelompok KRPL, proses simpan pinjam kelompok KRPL dsb. Sedangkan tempat untuk melakukan observasi pada penelitian ini ialah Desa Kebontunggul.

3) Dokumen

Dokumen merupakan sumber data dalam bentuk catatan-catatan resmi. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Dasar Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebontunggul 2013-2019.
- d. Struktur organisasi kepengurusan Kelompok KRPL.
- e. Daftar simpan pinjam Kelompok KRPL.
- f. Dokumentasi foto kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan pembangunan KRPL Desa Kebontunggul.



Terdapat jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer menurut Pasolong (2012:70) adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari obyek penelitiannya. Kemudian data itu juga bisa diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini jenis data primer diperoleh dari informan seperti apa saja upaya yang sudah dilakukan dari BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul, serta bagaimana pemerataan yang diterima dari sisi pelaku KRPL. Dan apa saja hambatan dan pendukung pelaksanaan upaya pemberdayaan itu sendiri.

b. Data Sekunder

Pengertian terkait dengan data sekunder menurut Pasolong (2012:70) yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, data sekunder dalam penelitian ini ialah melalui jurnal dan studi pustaka serta catatan-catatan Pemerintah Desa Kebontunggul yang berkaitan dengan pemberdayaan serta Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kemudian melalui penelitian terdahulu tentang pemberdayaan yang sesuai dengan penelitian ini, juga beberapa situs resmi seperti BPS yang menyanggah data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan utama penelitian sendiri yaitu mendapatkan data. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat



dari Sugiyono (2011:224) bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa, mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan”. Untuk itu terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan/observasi

Peneliti menggunakan observasi secara langsung, dalam penelitian ini observasi langsung dibutuhkan guna dapat memahami kondisi *rill* yang ada dalam obyek penelitian itu sendiri. kemudian observasi langsung yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup upaya pemberdayaan serta proses pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kebontunggul sesuai dengan fokus kegiatan yang diambil yaitu KRPL, juga keadaan *rill* Kawasan Rumah Pangan Lestari yang ada di masyarakat Desa Kebontunggul. Observasi dilakukan selama 1 minggu 3 kali dalam waktu 2 bulan penelitian. Sedangkan untuk lama waktu observasi menyesuaikan agenda masyarakat KRPL dan jam kerja pemerintah Desa Kebontunggul. Dalam observasi alat bantu yang digunakan adalah handphone untuk melakukan dokumentasi dalam bentuk foto, kemudian alat tulis sebagai sarana membuat catatan lapangan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam pendekatan model kualitatif. Dalam penelitian ini terlepas dari penggunaan teknik observasi peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Dalam



teknik wawancara beberapa pertanyaan diajukan kepada informan yang sebelumnya pertanyaan sudah disusun dalam bentuk pedoman wawancara dan alat yang digunakan adalah voice recorder dan alat tulis. Dalam penelitian ini topik bahasan wawancara adalah:

- 1) Upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan, baik dari BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul. Lama wawancaranya adalah masing-masing 2 minggu pertama penelitian, untuk frekuensinya adalah 2x dalam seminggu. Sedangkan durasinya adalah 1 jam.
- 2) Faktor-faktor yang memengaruhi baik penghambat dan pendukung. Bulan ke-2 penelitian, frekuensi 3x dalam seminggu pada jam kerja.
- 3) Tingkat pemerataan upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan. Bulan ke-2 penelitian 1x dalam seminggu, waktu mengikuti masyarakat desa.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini adalah cara memperoleh data melalui pengambilan dokumen-dokumen atau arsip serta artikel maupun jurnal penelitian ilmiah dan buku-buku yang terkait dengan penelitian yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:240) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sedang berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang dilakukan adalah:



1) Mengambil gambar sesuai dengan fokus penelitian ketika kegiatan observasi dan merekam percakapan dan membuat catatan ketika proses pengambilan data melalui wawancara.

2) Mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti RPJMDes Kebontunggul, dokumen keorganisasian KRPL, serta beberapa dokumen penunjang fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Pengertian instrumen penelitian sendiri bisa merujuk pada alat bantu yang dapat digunakan sebagai penunjang proses pengumpulan data sehingga mempermudah kegiatan penelitian itu sendiri. sedangkan menurut Moleong (2004:169) terkait dengan instrumen penelitian menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana data tersebut didapatkan.

Sejalan dengan hal tersebut instrumen yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Penulis sendiri, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan kualitatif, sejalan dengan hal tersebut sehingga instrumen penelitian banyak bergantung pada penulis itu sendiri. disini penulis juga dimaksudkan sebagai instrumen utama (*instrument guide*) yang mampu melakukan observasi dengan menggunakan panca indera terkait upaya pemberdayaan melalui kegiatan KRPL di Desa Kebonunggul.



2. Pedoman Wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang dibutuhkan ketika melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian.

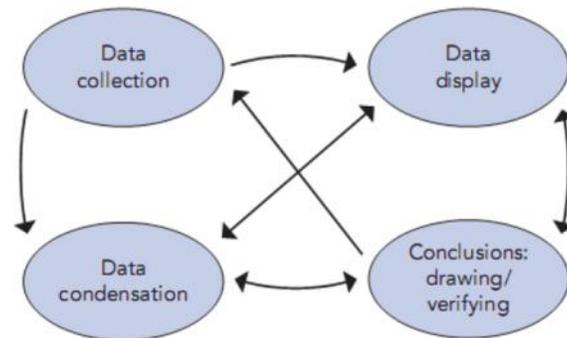
Pedoman wawancara menjadi alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Topik pedoman wawancara yang digunakan adalah seperti yang sudah dijelaskan pada teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara.

3. Catatan Lapangan atau *field note*, merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dialami dan dipikirkan ketika kegiatan pengumpulan data sedang berlangsung dan merupakan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Catatan lapangan berfungsi sebagai kesimpulan atau intisari dari proses pengambilan data.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data sehingga data yang diperoleh lebih sederhana dan mudah dipahami kemudian dapat digambarkan secara jelas dan runtut. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh M.B Miles, A.M. Huberman dan J. Saldana (2014:31-33). Analisis data tersebut memiliki 3 langkah yaitu kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut gambar analisis data model interaktif dari Miles & Huberman:



Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014:20)

Komponen-komponen analisis data model interaktif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses reduksi data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data sendiri adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Pada penelitian ini kondensasi data berupa keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian terkait pemberdayaan KRPL, kemudian di reduksi menjadi data yang sesuai dengan fokus pemberdayaan yaitu pada sosialisasi dan pendidikan, permodalan dan pemasaran. Serta faktor pendukung dan penghambat di dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kebontungul.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah tahap kondensasi data selesai dilakukan, berlanjut pada tahap penyajian data. Yang dimaksud dari penyajian data adalah sekumpulan



informasi yang telah tersusun dan mampu memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti gambarkan pada tabel dan gambar seperti yang sudah disusun pada daftar tabel dan daftar gambar, kemudian penyajian data secara deskriptif peneliti gambarkan pada BAB IV mengenai gambaran umum sedangkan hasil wawancara ada pada BAB IV data fokus penelitian baik tentang upaya pemberdayaan maupun hambatan serta faktor pendukung.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data. Jadi data setelah disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mendapatkannya dari gambaran fokus penelitian baik terkait dengan permodalan, pendidikan dan sosialisasi hingga pemasaran. Serta kesimpulan tentang faktor pendukung dan penghambat upaya pemberdayaan.

H. Keabsahan Data

Hasil dari suatu penelitian perlu uji keabsahan data. Hal tersebut berguna untuk membuat suatu data yang didapat bisa dikatakan valid. Menurut Meolong (2014:320) mengatakan bahwa setiap keabsahan data harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

a. Visi dan Misi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang tergabung dalam Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki pemerintahan daerah yang berdaulat. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Kabupaten Mojokerto sendiri pemerintah daerah menyusun suatu Visi dan Misi. Visi dan misi tersebut berguna sebagai arah dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 diketahui bahwa Visi dari Kabupaten Mojokerto adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”. Untuk penjelasan Visinya sebagai berikut:

- a) Terwujud, terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



- b) Mandiri, Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
- c) Sejahtera, dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto.
- d) Bermartabat, memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.
- e) Penguatan, Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.
- f) Pengembangan, yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.



g) Perekonomian, yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

h) Pendidikan, yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul.

i) Kesehatan, yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Sedangkan Misi dari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan



pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kebanggaan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Visi diatas merupakan tujuan jangka panjang dari Kabupaten Mojokerto atau juga bisa disebut sebagai sasaran juga sebagai pokok tujuan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Misi diatas merujuk pada penjabaran dari Visi



diatas atau juga bisa dikatakan sebagai cara atau metode secara spesifik untuk menuju tujuan tersebut dan juga sasaran yang ingin dicapai.

b. Kondisi Geografis dan Administratif

Wilayah Kabupaten Mojokerto sekitar 2.09% dari luas Provinsi Jawa Timur.

Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro. Sedangkan secara spatial Tata

Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang

Kertosusila”, Letak Kabupaten Mojokerto sendiri secara geografis terletak antara

koordinat 111°20’35” s/d 111°40’47” Bujur Timur dan antara 7°18’35” s/d 7°47’30”

Lintang Selatan. Kemudian untuk luas daerah keseluruhan yaitu 969.360 Km². Untuk

rincian luas wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 4
Rincian Luas Kabupaten Mojokerto

Tipe Wilayah	Luas (Km ²)
Pemukiman	132.440 Km ²
Pertanian	371.010 Km ²
Hutan	289.480 Km ²
Perkebunan	170.000 Km ²
Rawa/Waduk	0.490 Km ²
Lahan Kritis	0.200 Km ²
Padang Rumput	1.590 Km ²
Semak Alang-alang	0.720 Km ²

Sumber : RPJMD 2011-2015 Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki batas-batas wilayah atau administratif sebagai berikut:

a. Sebelah utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.



b. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu.

d. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang.

Secara administratif Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan dengan

229 Desa dan 5 Kelurahan. Kemudian luas keseluruhan wilayah Kabupaten

Mojokerto adalah 969.360 Km². Berikut adalah peta dari Kabupaten Mojokerto :



Sumber : mojokertokab.go.id, 24 Mei 2017

Sedangkan untuk rincian Kecamatan, Desa serta Kelurahan yang ada di Kabupaten

Mojokerto seperti tabel dibawah ini :



Tabel 5
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1.	Trowulan	-	16
2.	Sooko	-	15
3.	Puri	-	16
4.	Bangsals	-	17
5.	Mojoanyar	-	12
6.	Gedeg	-	14
7.	Kemlagi	-	20
8.	Dawarblandong	-	18
9.	Jetis	-	16
10.	Mojosari	5	14
11.	Ngoro	-	19
12.	Pungging	-	19
13.	Kutorejo	-	17
14.	Dlanggu	-	16
15.	Jatirejo	-	19
16.	Gondang	-	18
17.	Pacet	-	20
18.	Trawas	-	13
Jumlah		5	299

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

c. Topografi

Kabupaten Mojokerto berdasarkan struktur tanahnya memiliki karakteristik cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi pada bagian selatan dan utara. Bagian selatan yang merupakan wilayah pegunungan wajar apabila merupakan dataran tinggi dengan karakter tanah yang subur serta produktif. Wilayah selatan sangat cocok apabila digunakan untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan serta kehutanan. Yang masuk pada wilayah selatan meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Untuk wilayah Kabupaten Mojokerto bagian tengah



merupakan wilayah dataran sedang. Sedangkan untuk bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang bergelombang dengan karakter tanah yang cenderung kering dan kurang subur. Berikut adalah tabel rincian tinggi dan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Mojokerto :

Tabel 6
Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah *) (Km ²)
1.	Jatirejo	140	8.510.99
2.	Gondang	240	11.337.42
3.	Pacet	470	9.832.02
4.	Trawas	600	6.594.29
5.	Ngoro	120	6.902.95
6.	Pungging	100	4.476.28
7.	Kutorejo	170	4.629.53
8.	Mojosari	100	3.044.38
9.	Bangsar	60	2.373.70
10.	Mojoanyar	54	2.479.67
11.	Dlanggu	120	3.736.10
12.	Puri	70	3.781.25
13.	Trowulan	60	4.647.14
14.	Sooko	64	2.497.32
15.	Gedeg	36	2.662.46
16.	Kemlagi	52	5.848.19
17.	Jetis	60	6.065.33
18.	Dawarblandong	75	8.127.95
Kab. Mojokerto		8	97.546.97

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 *)Tanpa Hutan Negara

Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian lahan terletak diantara 15 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut. Namun tingkat ketinggian wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut. Hanya Kecamatan Trawas yang mempunyai ketinggian lebih dari



600 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Mojokerto sekitar 30% dari keseluruhan wilayahnya memiliki tingkat kemiringan lebih dari 15 derajat. Sedangkan untuk sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan dibawah atau kurang dari 15 derajat. Ketinggian lahan dari permukaan laut bisa dijadikan penentu dalam menetapkan wilayah tanah usaha. Untuk wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat sebagai berikut :

1. Ketinggian tempat 0-500 m memiliki luas sekitar 93.24% dari wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Ketinggian tempat 500-1000 m memiliki luas 6.76% dari total luas wilayah Kabupaten Mojokerto.

d. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 sebanyak 1.186.497 jiwa untuk laki-laki sebanyak 597.463 sedangkan untuk perempuan 589.034 jiwa.

Kemudian sesuai dengan data dari BPS rata-rat penduduk pada Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Jumlah Penduduk Tahun 2012-2014

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah Penduduk	1.143.747	1.162.630	1.186.497
Laki-laki	575.435	585.135	597.463
Perempuan	568.312	577.495	589.034

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Kesimpulan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Mojokerto lebih banyak laki-laki, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk



perempuan. Untuk rincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jatirejo	23.267	22.685	45.952
2.	Gondang	22.987	22.732	45.719
3.	Pacet	30.761	30.580	61.341
4.	Trawas	16.065	16.071	32.136
5.	Ngoro	42.507	42.644	82.151
6.	Pungging	40.343	39.871	80.214
7.	Kutorejo	34.401	33.516	67.917
8.	Mojosari	42.136	41.152	83.288
9.	Dlanggu	30.156	29.897	80.053
10.	Bangsals	27.677	26.981	54.658
11.	Puri	40.922	40.309	81.231
12.	Trowulan	41.086	40.157	81.243
13.	Sooko	40.794	39.993	80.787
14.	Gedeg	31.858	31.471	83.329
15.	Kemlagi	31.952	31.939	83.891
16.	Jetis	45.995	44.759	90.754
17.	Dawarblandong	27.554	27.936	55.490
18.	Mojoanyar	27.002	26.341	53.343
	Jumlah	597.463	589.034	1.186.497

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu modal pembangunan.

Apabila pertumbuhan penduduk suatu daerah pesat dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki modal dasar yang cukup bagi pembangunan yang potensial.

Kabupaten Mojokerto sendiri pada tahun 2014 memiliki presentase pertumbuhan penduduk sebesar 2.05%. Sedangkan klasifikasi penduduk berdasarkan struktu mata



pencapaian sesuai dari data BPS Kabupaten Mojokerto yang dikutip dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, bahwa Kabupaten Mojokerto didominasi oleh pekerja dibidang industri yang pada tahun 2013 mencapai jumlah 149.714 Jiwa. Kemudian selanjutnya penduduk bermata pencaharian dibidang perdagangan, rumah makan, restoran, warung, catering dan jasa akomodasi seperti hotel dan penginapan mencapai 118.884 jiwa. Untuk yang terakhir ialah penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan pada tahun 2013 mencapai jumlah 107.862 jiwa.

2. Gambaran Umum Desa Kebontunggul

a. Sejarah

Sejarah Desa Kebontunggul tidak bisa dilepaskan dari jejak Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Jejak Kerajaan Majapahit di Desa Kebontunggul dapat diambil dari tapak tilas legenda Ki Gede Tunggul Manik yang merupakan seorang ahli tata ruang di Kerajaan Majapahit. Situs-situs milik Ki Gede Tunggul Manik tersebut atau yang juga dikategorikan termasuk benda peninggalan dari Kerajaan Majapahit bisa ditemukan berupa relief batu merah kuno dan tarakota yang tersebar di Dusun Jemanik Desa Kebontunggul, kemudian situs pakem dan umpak di Desa Kemasantani melalui susur sungan Jemanik Desa Kebontunggul. Pengambilan nama Kebontunggul juga berdasar kesesuaian dengan tokoh Ki Gede Tunggul Manik.

Nama Kebontunggul sendiri memiliki makna spiritual yaitu berupa harapan besar terhadap pengelolaan potensi tata ruang dan waktu yang diilhami dari kegiatan



yang pernah ada di desa tersebut. Dasar pengambilan nama Desa Kebontunggul berdasarkan nama “Kebondalem Penunggulan” yang memiliki makna secara harfiah kebon yang berarti pekarangan atau tempat, dalem yang memiliki arti rumah atau kepemilikan di dan penunggulan yang berarti selalu unggul atau kesesuaian dengan tokoh dari Ki Gede Tunggul Manik sendiri. pada dahulunya mayoritas penduduk Kebontunggul bermata pencaharian dibidang perkebuna dan cocok tanam dan dikenal memiliki hasil panen yang selalu melimpah.

Desa Kebontunggul yang memang memiliki sejarah yang cukup gemilang pada dahulunya memberika motivasi untuk anak cucunya dalam melestarikan dan menjaga desa. Dikisahkan bahwa keberhasilan Desa Kebontunggul secara turun temurun dilestarikan oleh 3 generasi kepemimpinan Kepala Desa. Generasi Kepala Desa Kebontunggul masih satu silsilah keluarga besar. Pada tahun 1924-1935 desa Kebontunggul dipimpin oleh Niti Soedirjo, kemudian pada tahun 1946-1989 oleh Tjokro Dihadjo, dan 2007 hingga sekarang oleh Siandi, SH.,MM. Kebontunggul juga dijadikan sebagai simbol yang akan memotivasi pemerintah Desa Kebontunggul. Kata-kata yang dijadikan pegangan adalah Kebontunggul Desa Unggul di Tlatah Majapahit.

b. Geografis dan Topografi Desa

Desa Kebontunggul terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Wilayah Desa Kebontunggul memiliki luas daerah keseluruhan 263.215 Ha atau sekitar 27.15% dari Luas Kabupaten Mojokerto. Sedangkan untuk rincian Luas wilayah Desa Kebontunggul dapat dilihat sebagai berikut :



1. Pemukiman : 22.400 Ha
2. Pertanian : 142.220 Ha
3. Tegalan : 73.615 Ha
4. Fasum : 24.980 Ha

Desa Kebontunggul berada pada ketinggian 300m dari permukaan laut. Desa Kebontunggul juga merupakan salah satu dataran tinggi di Kabupaten Mojokerto, dengan suhu udara rata-rata 32° C. Sedangkan untuk batas-batas wilayah administrasi

Desa Kebontunggul sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : wilayah Desa Pugeran dan Desa Gondang
2. Sebelah Timur: wilayah Desa Kemasantani
3. Sebelah Selatan : wilayah hutan Desa Gumeng
4. Sebelah barat : wilayah Desa Wonoploso

Desa Kebontunggul secara administratif terdiri dari 4 Dusun yang dibagi menjadi 4 RW dan 12 RT. Kemudian topografi wilayah Desa Kebontunggul cenderung cekung pada wilayah barat dan utara sedangkan untuk bagian selatan dan timur cenderung tinggi. Untuk rincian tinggi dan luas wilayah per Dusun dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 9
Tinggi dan Luas Daerah Menurut Dusun

No.	Dusun	Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha)
1.	Penunggulan	700	62.340
2.	Sengon	700	86.630



No.	Dusun	Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha)
3.	Jemanik	550	62.685
4.	Kudur	400	51.560
Desa Kebontunggul			263.215

Sumber : RPJMDes Kebontunggul 2013-2019

Kabupaten Mojokerto sebenarnya memiliki sekitar 43 buah sungai yang sudah memiliki nama. Sedangkan untuk sungai besar yang melewati wilayah Desa Kebontunggul berjumlah 2 buah sungai, yaitu sungai Pikatan dengan debit air ± 12 Liter/detik dan sungai Landean dengan debit air ± 7 liter/detik. Sedangkan untuk panjangnya, sungai Pikatan memiliki panjang 1,8 Km dengan luas daerah pengairan 121.220 Ha. Untuk sungai Landean memiliki panjang sungai 1 Km dengan luas daerah pengairan 21.000 Ha. Desa Kebontunggul memiliki jarak dari pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto sekitar 28 km, sedangkan untuk jarak dari pusat pemerintah kecamatan adalah 3 km. Untuk peta wilayah Desa Kebontunggul sebagai berikut :



Gambar 3 Peta Administratif Desa Kebontunggul

Sumber : RPJMDes Kebontunggul 2013-2019



c. Demografi

Desa Kebontunggul memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sejumlah 1706 Jiwa. Dengan laki-laki yang berjumlah 820 jiwa dan perempuan yang berjumlah 886 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Desa Kebontunggul di dominasi oleh perempuan. Untuk tabel jumlah penduduk di Desa Kebontunggul sesuai dengan dusun dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 10
Jumlah Penduduk Tahun 2013 menurut Jenis Kelamin per Dusun

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Penunggulan	150	165	315
2.	Sengon	272	283	557
3.	Jemanik	156	18	309
4.	Kudur	242	258	500
	Jumlah	820	886	1.706

Sumber : RPJMDes Kebontunggul 2013-2019

Berdasarkan struktur mata pencaharian maka penduduk Desa Kebontunggul didominasi pekerja dibidang Pertanian yang mencapai jumlah 759 jiwa, diikuti dengan penduduk bermata pencaharian dibidang swasta, industri pengolahan mencapai jumlah 83 jiwa, serta 24 jiwa untuk penduduk yang bermata pencaharian di bidang Pegawai Negeri.

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat tergantung pada penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Penghasilan masyarakat sangat bergantung pada mata pencaharian masyarakat.

Untuk Desa Kebontunggul sendiri memiliki penduduk yang didominasi oleh



penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, kemudian baru diikuti oleh swast, industri pengolahan dan pegawai negeri sipil. Banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani membawa Desa Kebontunggul pada pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Namun dalam kesehariannya terdapat permasalahan pada bidang ekonomi di Desa Kebontunggul. Seperti yang sudah dijelaskan pada RPJMDes Kebontunggul tahun 2013-2019 sebagai berikut :

1. Penghasilan rendah belum mencukupi kebutuhan dasar hidupnya
2. Produk unggulan belum terlembaga secara representatif
3. Masih diperlukan peningkatan kesejahteraan petani melalui bimbingan dan fasilitasi pola tanam dan infra-struktur yang baik
4. Usaha mikro kecil masih terkendala kurangnya modal untuk pengembangan usahanya, kurangnya informasi pemasaran, masih bersifat sendiri-sendiri (parsial) dan kurangnya keahlian dalam bidangnya.

Permasalahan sosial lainnya yang ada pada Desa Kebontunggul mencakup kesehatan, pendidikan, lingkungan serta masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti di bawah ini:

1. Kesehatan, permasalahan kesehatan meliputi :
 - a) Masih adanya ibu hamil yang tidak mengikuti imunisasi TT, tidak memeriksakan kondisi kehamilannya dan mengalami anemia, dan enggan berangkat ke Posyandu
 - b) Masih ada balita yang dalam kartu catatan penimbangan berada pada garis kuning dan merah



c) Masih kurang adanya perhatian yang lebih serius terhadap warga miskin lanjut usia (lansia)

d) Adanya penyakit menular demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi pada setiap musim penghujan

e) Pada umumnya penyakit yang diderita antara lain: ISPA, diare, hipertensi, paru-paru.

2. Pendidikan, masalah pendidikan yang masih perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

a) Masih ada orang dewasa yang tidak tamat SD

b) Anak usia sekolah yang putus sekolah dan belum memenuhi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

c) Biaya pendidikan yang terlalu tinggi dan belum adanya pihak-pihak yang bersedia menjadi orang tua asuh

d) Masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan keagamaan yang cukup

e) Kurang memadainya sarana prasarana pendidikan non formal

3. Lingkungan, masalah lingkungan yang cukup mendesak untuk memperoleh penanganan antara lain :

a) Masih terdapat rumah yang tidak layak huni, dan membuang kotoran ternak di pekarangan.

b) Penataan Kawasan lingkungan organik



c) Saluran (drainase) yang ada kondisinya sudah rusak/ambrol sebagian dan kurang lebar/dalam.

d) Masih ada jalan penting yang biasa dilalui warga belum di buka secara normal tidak ada lampu penerangannya

e) Masih adanya warga tidak memiliki kakus yang buang air besar di sungai

f) Jalan lingkungan di beberapa tempat sudah rusak meskipun sebelumnya telah dibangun melalui program-program peningkatan jalan oleh Pemerintah.

4. Sosial Lainnya

a) Prasarana olahraga bagi warga masih belum memadai

b) Kegiatan pendidikan keagamaan bagi remaja dan orang dewasa masih perlu dikembangkan dan diorganisasi

c) Masih belum terpenuhinya sarana prasarana kegiatan keagamaan

3. Gambaran Umum Pemerintah Desa Kebontunggul

a. Visi dan Misi

Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pelaksana kewenangan yang telah diberikan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berhak melaksanakan tugasnya dan wajib untuk memenuhi tugasnya guna kepentingan

masyarakat Desa Kebontunggul itu sendiri. Untuk itu pemerintah Desa Kebontunggul membentuk Visi dan Misi Desa Kebontunggul yang digunakan sebagai pedoman dan

arah gerak atau tujuan dari pemerintah desa. Visi Desa Kebontunggul adalah "Terwujudnya Percepatan Pemerintah Desa Kebontunggul yang Amanah dan



pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga terwujud peningkatan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata, karena dilakukan oleh pemerintah Desa Kebontunggul bersama masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, pemerintah Desa Kebontunggul mempunyai Misi antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas keamanan aspek ekonomi, sosial dan budaya.
2. Mewujudkan desa mandiri melalui pengembangan pembangunan ketahanan pangan dan peningkatan mutu program kesehatan secara terintegrasi dengan lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengarusutamakan peran aktif masyarakat terhadap pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
4. Menciptakan ketertiban terhadap pengendalian ketentraman lingkungan.

Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan rincian strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah desa Kebontunggul. Strategi tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur sistem budidaya integrasi tanaman, ternak dan ikan serta pelaksanaan program mutu kesehatan secara terpadu dan lintas sektoral.



Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kebontunggul
(sumber : RPJMDes Kebontunggul Tahun 2013-2019)

Pemerintah Desa Kebontunggul meliputi :

1. Kantor Desa : ada dalam kondisi baik
2. Kantor LPM : ada dalam kondisi baik
3. Kantor BPD : ada dalam kondisi baik
4. Kepala Desa : 1 Orang
5. BPD : 7 Orang
6. Perangkat Desa : 5 Orang
7. Kepala Dusun : 4 Orang
8. LPM : 10 Orang

Sedangkan untuk lembaga kemasyarakatan di Desa Kebontunggul yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebagai berikut :



1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : 10 orang pengurus
2. TP.PKK Desa : 22 orang pengurus
3. Karang Taruna : 73 orang anggota
4. Karang Werdha : 150 orang anggota
5. Remaja Masjid : 18 orang anggota
6. Muslimat : 110 orang anggota
7. HKTI/HIPPA/LMDH : 232 orang anggota
8. Majelis Taklim : 287 orang anggota
9. Organisasi RT/RW (Bapak-bapak) : 16 orang anggota
10. Gapoktan : 317 orang anggota

4. Gambaran Umum Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur

a. Visi dan Misi

BPTP Provinsi Jawa Timur memiliki arah sebagai penghasil dan penyedia teknologi tepat guna spesifik lokasi, dalam arti luas untuk menunjang pengembangan pertanian berwawasan agribisnis bagi Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut BPTP Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi. Kemudian untuk Visi BPTP Provinsi Jawa Timur yaitu “Institusi Penghasil dan Penyedia Teknologi Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi Jawa Timur.” Sedangkan untuk misi dari BPTP Provinsi Jawa Timur antara lain:

- 1) Menghasilkan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya.



- 2) Menyediakan, mendiseminasikan dan mempromosikan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil-hasil pertanian yang berwawasan lingkungan dan agribisnis.
- 3) Meningkatkan pendapatan keluarga tani dan kesempatan kerja produktif yang berkeadilan.
- 4) Menjamin kemitraan dengan *stakeholder* (instansi terkait, swasta, LSM, dll) untuk memberdayakan petani dalam mengelola usaha taninya.
- 5) Menumbuhkembangkan peran kelembagaan untuk memantapkan ketahanan pangan.
- 6) Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan pertanian daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BPTP Provinsi Jawa Timur

Tugas dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi bagi semua komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan teknologi yang bersifat terapan (siap pakai) dengan mempertimbangkan optimasi produksi serta pendapatan petani. Sedangkan untuk fungsi dari BPTP Provinsi Jawa Timur adalah :

- 1) Mengadakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- 2) Melakukan penelitian dan pengkajian serta perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.



B. Penyajian Data

1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebontunggul melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, memang sudah seharusnya ditunjang dengan pemberian fasilitas pemberdayaan yang nantinya akan mampu mendukung kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Upaya pemberdayaan untuk masyarakat desa Kebontunggul dilakukan oleh 2 aktor pemberdaya yaitu BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul. Sedangkan masyarakat desa yang akan diberdayakan melalui kegiatan KRPL ini sesuai dengan sasaran kegiatan yaitu wanita yang disebut dengan Kelompok Wanita Tani yang nantinya akan tergabung pada organisasi Kelompok KRPL Desa Kebontunggul. Pemberdayaan melalui KRPL dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan oleh pemerintah Desa Kebontunggul dengan berbagai upayanya. Namun sesuai dengan konsep pemberdayaan sendiri, upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kawasan rumah pangan lestari terbagi atas, sebagai berikut:

a. Permodalan

Suatu kegiatan usaha yang menduduki posisi penting adalah permodalan. Permodalan menjadi salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu usaha tidak terkecuali kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Tanpa dukungan permodalan yang baik atau modal yang cukup, maka suatu kegiatan KRPL bisa berjalan lambat atau bisa juga sama sekali tidak berkembang. Dalam proses pelaksanaan kegiatan KRPL yang bertujuan untuk pemenuhan pangan dan gizi



keluarga dan diupayakan sebagai tambahan penghasilan sehingga berujung pada kesejahteraan, sudah menjadi salah satu syarat utama yaitu manajemen permodalan yang baik. Kurangnya pemberian modal seringkali menjadi faktor penghambat dalam suatu kegiatan pemberdayaan. Kurangnya pemahaman bahwa sangat pentingnya kegiatan pemberdayaan mempengaruhi insentifitas pemberian modal. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah untuk mengelola atau memajemen permodalan bagi setiap kegiatan. Pengelolaan permodalan bisa berupa akses modal yang lebih dipermudah serta modal dalam bentuk peralatan dan dana secara langsung untuk menunjang kegiatan.

Masyarakat Desa Kebontunggul juga mengalami masalah terkait dengan permodalan. Pada dasarnya Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu kegiatan yang tidak memakan biaya banyak. Hal tersebut dikarenakan pada awal pembentukan modal dibiayai oleh masyarakat serta dibiayai oleh Kementerian Pertanian melalui BPTP Provinsi Jawa Timur. Bentuk permodalan yang diberikan BPTP mencakup pembuatan *green house* dan kebun bibit sayur dan buah serta pemberian bibit-bibit bakal sayur dan ternak, yang merupakan tahap awal Kegiatan KRPL. Pernyataan tersebut relevan dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“...lambung pangan ini memang tidak bersumber dari lapangan pertanian yang ada melainkan juga dari pekarangan warga yang kosong, yang isinya bukan hanya ditanami sayur, buah tapi juga ternak serta perikanan sehingga kegiatannya terintegrasi. *Green house* serta demplot merupakan awal pembentukan KRPL. Karena semaraknya masyarakat ada swadaya dari masyarakat juga. Kemudian dari Pemerintah Desa juga ikut membantu seperti apabila ada kekurangan bagi bibit atau alatnya misal polibeg kita bantu.”



(wawancara tanggal 29 Mei 2017 pukul 09.07 WIB di Kantor Desa Kebontunggul).

Kemudian pernyataan dari BPTP Provinsi Jawa Timur terkait dengan permodalan seperti berikut ini:

“permodalan untuk perintisan dari BPTP Provinsi asal modalnya dari kementerian pertanian langsung, sedangkan apabila membutuhkan alat ada prosedurnya sifatnya pinjam pakai, jadi modal dari kita semua istilahnya kita ngawal ya benih dijadikan bibit, media kayak polibeg kemudian pupuk sekam green house nah selanjutnya kita berharap mereka yang mengembangkan misalkan mereka menjual untuk membuat bibit lagi kan harus beli benih untuk beli pupuk lagi memang awalnya dari kita selanjutnya mereka yang mengembangkan” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.11 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Kegiatan KRPL sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk diverifikasi pangan yang dapat menunjang pemberian gizi kepada petani, namun dalam prosesnya diharapkan untuk dapat menambah penghasilan, sehingga diperlukan adanya bantuan untuk pengolahan hasil. Karena pada awalnya kegiatan ini merupakan agenda dari Kementria Pertanian, melalui BPTP Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan berupa alat guna untuk menunjang proses pengolahan hasil dari KRPL. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu (Ri) Peneliti di BPTP Provinsi Jawa Timur bahwa:

“kita memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang-barang itu, kira-kira untuk pengeluaran 2 desa sekitar 80 kalau misal 1 desa kebontunggul itu 40, sebenarnya itu bukan modal namanya tapi kalau modal kan jatuhnya uang tapi kita memberikan bantuan bahan sama alat alatnya sudah banyak itu kan bermacam-macam dek, alat penepung, alat untuk mengahncurkan tanaman toga, penggorengan, pengeringan. Jadi kita beri itu yang Kebontunggul karena mereka membutuhkan.” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.18 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)



keuangan desa dan Kelompok KRPL sangat menguntungkan dibandingkan dengan Bank konvensional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kebontunggul bahwa:

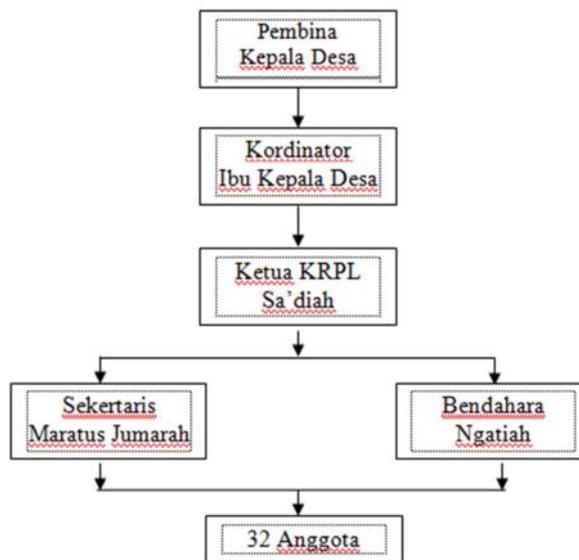
“Dari pemerintah Desa Kebontunggul memang tidak memberikan bantuan berupa uang mbak tapi memberikan kemudahan untuk meminjam modal di desa, kan ada lembaga keuangan desa itu diberikan kesempatan kesitu paling tidak diarahkan kesitu biasanya untuk modal pemanfaatan hasil KRPL misalnya buat keripik, samiler, termasuk juga pembuatan serbuk dari tanaman toga. Jadi artinya kami tidak memberikan bantuan uang namun terkait pengolahan hasil KRPL tadi kita kadang juga ikut mengganti, bentuknya hibah dari pemerintah desa yang diberikan kepada Kelompok KRPL. Yang nantinya ikut ada unit keuangan desa milik Pemerintah Desa sifatnya simpan pinjam dengan suku bunga yang murah sehingga usaha kecil menengah bisa berjalan. Jadi tanpa adanya jaminan sehingga membuat masyarakat tertarik. Kemudian kami juga memberntuk kelompok KRPL yang merupakan wadah dari wanita tani pelaku KRPL disitu juga ada yang sifatnya simpan” (wawancara tanggal 29 Mei 2017 pukul 09.07 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Upaya pemerintah Desa Kebontunggul dalam meningkatkan permodalan untuk kelangsungan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari memberikan akses yang lebih mudah terkait permodalan melalui Kelompok KRPL Desa Kebontunggul.

Kelompok KRPL akan memberikan fasilitas permodalan misalnya simpan pinjam untuk pelaku KRPL. Pada dasarnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani yang tergabung dan dipusatkan pada Kelompok KRPL. Untuk itu lembaga ekonomi produktif yang melayani KRPL adalah dari Kelompok KRPL itu sendiri serta dibantu dengan beberapa koperasi wanita Desa Kebontunggul. Dari lembaga keuangan desa tersebut masyarakat bisa deluasa meminjam tanpa adanya jaminan seperti halnya di bank konvensional.

Masyarakat pelaku KRPL dituntut untuk mengembangkan hasil dari

KRPLnya misalkan dengan pembuatan keripik-keripik serta serbuk jamu dari tanaman toga. Dan dari situ pemerintah Desa Kebontunggul memberikan alat saja, namun tidak memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat pelaku KRPL. Pemerintah Desa Kebontunggul mendapatkan alat tersebut dari hasil kerjasama dengan BPTP Provinsi Jawa Timur. Pemerintah desa juga membentuk satu kelompok khusus untuk menaungi wanita tani sebagai pelaku KRPL. Yaitu Kelompok KRPL bentukan pemerintah desa, untuk susunan organisasinya sebagai berikut :



Gambar 6 Struktur Organisasi Kelompok KRPL

Sumber : Hasil wawancara Tanggal 31 Mei 2017 dengan Ketua KRPL

Kelompok KRPL bisa dijadikan sebagai sarana simpan pinjam yang fungsinya hampir sama dengan lembaga keuangan desa. Juga bisa sebagai sarana untuk memberikan info dan sebagai sarana pemecahan permasalahan pelaksana kegiatan KRPL dibawah naungan Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pihak yang



melakukan pengawasan. Dari upaya tersebut pemerintah Desa Kebontunggul memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan serta bisa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pernyataan tersebut sejalan dengan Ketua KRPL Ibu (SA) Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“...Sebenarnya modal untuk pelaksanaan kegiatan KRPL bisa didapatkan dengan mudah kan sama pemerintah desa melalui PKK sama melalui kami bisa untuk melakukan simpan pinjam jadi tidak begitu ada masalah. Kemudian pertemuan tanggal 25 itu juga kami pakai untuk merekatkan ikatan gitu jadi tidak datang untuk sia-sia, acaranya seperti arisan, simpan pinjam, terus kita juga mendiskusikan masalah tiap anggota masalah pelaksanaan KRPL, jadi biar kita tau gitu kemudian kita juga mencari jalan keluarnya, seperti itu fungsinya Kelompok KRPL.” (wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 09.19 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Sebagai upaya dalam permodalan atau bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yaitu KRPL ini, BPTP memberikan bantuan berupa alat-alat sebagai awalan perintisan kegiatan, bisa berupa bibit, media, pupuk juga alat untuk pengolahan hasil. Sedangkan untuk meningkatkan permodalan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, pemerintah Desa Kebontunggul sudah memberikan kontribusi dan melaksanakan peranya. Memang bukan dalam bentuk pemberian uang langsung kepada masyarakat yang bergerak melaksanakan Kawasan Rumah Pangan Lestari tersebut, namun pemerintah Desa Kebontunggul berinisiasi untuk mempermudah syarat serta jaminan permodalan. sedangkan pemerintah Desa Kebontunggul hanya mengendalikan dan mengawasi dibalik layar. Dengan begitu keuntungan yang diperoleh akan lebih memusat pada masyarakat Desa Kebontunggul itu sendiri, serta masyarakat pelaksana kegiatan KRPL lebih diuntungkan.



Pelaksanaan simpan pinjam dalam kegiatan KRPL masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepala Desa Kebontunggul menganggap bahwa seringkali masalah keterlambatan pembayaran dari masyarakat yang meminjam untuk modal usaha membuat uang dalam lembaga tersebut tidak berputar. Sehingga terkadang membuat masyarakat lain yang ingin untuk meminjam tidak dapat diberikan modalnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“sebenarnya kami sudah berusaha semampu kami untuk memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha. Tapi kami mempunyai masalah sama berputarnya uang dalam anggota. Kadang ada masyarakat yang sudah meminjam dan sudah ditentukan batas terakhir bayarnya, masih belum membayar sering telat. Kita sudah memberikan sanksi yang tegas. Jadi tetep kita adakan pendekatan dulu kita tanya faktor penyebabnya kok telat gitu, bentuk teguran bisa 1, 2, sampek 3. Sehingga nanti melalui pendekatan teguran ini supaya nanti pulih kembali, jadi lancar kembali. Sehingga nanti tidak menghambat beliaunya sendiri. Kalau misal ada yang belum bayar sesuai jadwal yang ditentukan, akan menghambat yang lainnya juga. Sehingga kalau masyarakat yang bersangkutan tetap seperti itu disisihkan dilakukan penanganan khusus dari pemerintah desa termasuk dari kelompok KRPL dan BPD dan LPMD saya libatkan. Kadang juga ada sanksi yang tegas misalkan 1 bulan ke depan tidak diperbolehkan untuk meminjam lagi.”(wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.14 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Sedangkan dari sisi Kelompok Wanita Tani yang merupakan anggota dari Kelompok KRPL, juga mengungkapkan terkait kendala pelaksanaan permodalan seperti masalah telat mengangsur. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota Kelompok Wanita Tani (NG) pelaksana kegiatan KRPL Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“Begini mbak, sebenarnya saya memang sangat diuntungkan dengan adanya bantuan dari desa tapi kadang usaha saya juga tidak lancar mbak. Biasanya ya kayak orang bertani sendiri sekalipun di depan rumah tapi tetap saja kadang



airnya kering jadi tanaman mati, kadang tanaman saya tidak ada yang mau beli. Dari situ kan saya tidak ada pemasukan jadi ya tidak bisa bayar hutang ke pemerintah. Kadang saya dikasih peringatan dulu. Untungnya masyarakat desa sini itu masih guyup mbak jadi diomongi dulu baik-baik kitanya. Kadang kalau kepepet tidak bisa bayar ya nunggu bulan depan atau kalau ada yang beli.” (wawancara Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 08.12 WIB di rumah anggota Kelompok Wanita Tani pelaksana KRPL di Desa Kebontunggu)

Kemudian terdapat juga permasalahan bahwa ada salah satu pelaksana kegiatan KRPL tidak pernah merasakan meminjam modal dari kelompok bentukan pemerintah desa karena menganggap bahwa terkadang tidak adanya uang untuk meminjam dalam kelembagaan simpan pinjam tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh (DA) pelaku kegiatan KRPL dan merupakan anggota dari Kelompok KRPL yang mengatakan bahwa:

“saya belum pernah mendapatkan bantuan permodalan dari kelompok ibu-ibu itu mbak, memang kalau saya ikut pertemuan ada acara gituan seperti simpan pinjam. Tapi kan namanya kelompok itu merintis ya mbak ya jadi kadang uang buat modal itu ada kadang juga tidak ada. Kalau saya selama saya masih bisa pakai uang saya sendiri buat modal ngembangin usaha saya mendingan saya kasih kesempatan buat yang lebih membutuhkan saja.” (wawancara Tanggal 3 Juni 2017 Pukul 09.20 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Kesimpulan yang didapat dari penjelasan diatas bahwa BPTP Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Desa Kebontunggul sudah berupaya terkait pemberdayaan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan memberikan fasilitas permodalan. BPTP Provinsi Jawa Timur sebagai perintis kegiatan KRPL sudah memberikan tugasnya berupa pemberian bantuan alat pertanian khusus KRPL dan alat untuk pengolahan hasil namun terdapat permasalahan operasional alat hasil untuk KRPL yang hanya sedikit yang masih difungsikan. Sedangkan pemerintah Desa Kebontunggul



sebagai pengembang dari kegiatan KRPL melalui Lembaga Ekonomi Produktif Desa Kebontunggul serta Kelompok KRPL yang menanungi pelaku KRPL memberikan kemudahan pinjaman. Walaupun pemerintah Desa Kebontunggul sudah berupaya memberikan bantuan modal untuk pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Kebontunggul akan tetapi batuan modal tersebut masih belum dirasakan secara merata oleh Kelompok Wanita Tani selaku yang melaksanakan KRPL tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa anggota yang terkadang telat mengansuur sehingga menghambat anggota lain. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Desa Kebontunggul dalam meningkatkan permodalan melalui pemberian bantuan alat dan melalui lembaga ekonomi produktif serta Kelompok KRPL yang juga ikut serta dalam kegiatan simpan pinjam.

b. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan pelaksana dari suatu kegiatan, manusia yang mampu berkembang dan menyesuaikan keadaan dengan memunculkan inovasi-inovasi yang menarik akan menang melawan perkembangan jaman. Tak terkecuali manusia atau masyarakat Desa Kebontunggul. Kemampuan Sumber Daya Manusia memang sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan suatu usaha atau kegiatan. Seperti yang dijelaskan diatas SDM yang inovatif-lah yang nantinya akan bertahan ditengah laju perkembangan jaman. Masyarakat Desa Kebontunggul memang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Namun sasaran KRPL adalah Ibu-ibu yang masih belum tentu menguasai kegiatan pertanian serta inovasi pertanian saat ini sudah



sangat berkembang dan seringkali masyarakat desa luput untuk melakukan pengembangan cara bertani mereka. Sehingga keterampilan dan pengetahuan mereka perlu untuk dilakukan peningkatan. Hal tersebut nantinya akan membawa dampak baik bagi kualitas kawasan rumah pangan lestari itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa sasaran kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah pemanfaatan pekarangan. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah Ibu-ibu desa yang menjadi Kelompok KRPL. Pada tahun 2012 melalui munculnya kegiatan KRPL ini BPTP Provinsi Jawa Timur sebagai perintis kegiatan KRPL, melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Proses pemberdayaan sumber daya manusia ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu sosialisasi kemudian pelatihan. Tahap sosialisasi sebagai langkah awal untuk menajalsakan terkait kegiatan KRPL ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari ibu (Ri) peneliti bahwa:

“awalnya kita sosialisasi terlebih dahulu, jadi apa yang dimaksud dengan KRPL, pemanfaatan KRPL itu bagaimana, nah karena ini kan menyangkut seni tanam menanam kan. Jadi pelatihan itu awalnya dilakukan di green house sebelum nanti disebarakan, jadi kita membuat bibit juga, kita membuatnya sama-sama kelompok wanita tani, tetapi emang untuk penyediaan media dibantu yang laki-laknya” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.25 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)



Gambar 8 Pendidikan dan Pelatihan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Dokumentasi Pemerintah Desa Kebontunggul



Pada tahun 2012-2013 sesuai dengan agenda kegiatan KRPL BPTP Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan pelatihan secara intensif sebagai bentuk pemberdayaan kelompok KRPL. Pemberdayaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masing-masing individu kelompok KRPL. Untuk itu salah satu pemberdayaan yang dilakukan adalah memfasilitasi melalui sosialisasi dan pelatihan dalam jangka waktu 2012-2013, yang pada waktu itu kegiatan pelatihan dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan sedangkan maksimal pelatihan akan dilakukan 4 kali dalam 1 bulan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu (Ri) pelatih dari BPTP Provinsi Jawa Timur bahwa:

“pelatihan sendiri tidak bisa dihitung dalam berapa kali jadi dalam 1 tahun ketika ada pertemuan setiap saya kesana, kita pasti saya melakukan pelatihan jadi pelatihanya macem-macem tentang bagaimana membuat media yaitu pupuk, bagaimana memasukan media, bagaimana menyemai yang baik setelah mereka tumbuh nanti pemeliharanya bagaimana, jadi juga termasuk mengenalkan penyakit pada tanaman, kemudian alat-alat untuk mengolah hasil. pengolahan tujuannya untuk menambah ekonomi, misalkan tomat nanti bisa dibuat manisan. Jadi setiap kita kesana kita adakan pelatihan rata-rata seminggu 1 kali lah minimlanya 1 bulan 2x lah maksimalnya 4x biasanya insyallah setiap minggu kita kesana teruslah” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.28 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebagai langkah pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dalam prosesnya mendapatkan beberapa hambatan. Terkait wwaktu 1 tahun yang dianggap tidak cukup untuk membuat masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Juga terkait pola pikir masyarakat yang belum mau menerima, juga terkait kemandirian masyarakat terhadap adopsi teknologi serta kegiatan seperti KRPL ini masih sangat rendah. Sehingga masyarakat Kebontunggul



38

masmengharuskan pihak pemerintah untuk melakukan monitoring secara berkelanjutan sampai dengan pola pikir masyarakat bisa berubah. Hal ini akan berpengaruh pada berkelanjutnya kegiatan KRPL itu sendiri. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Ibu (Ri) Peneliti BPTP Provinsi Jawa Timur bahwa:

“kemudian karena waktu kami hanya 1 tahun kan sesuai dengan fungsi dari BPTP sendiri sebagai pembina untuk selanjutnya diserahkan ke desa, tapi dari daerah-daerah itu tidak mau meneruskan, jadi kemarin yang kami sesalkan sama pak andi (kepala desa kebontunggul) setelah lomba selese tidak ada pengawalan, dibiarkan saja kemudian pak andi yang sendirian menghadapi warganya ada yang mau ada yang nggak jadikan turun, awalnya sih bagus mbak” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.31 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur meliputi sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan guna mengenalkan apa itu kegiatan KRPL dan manfaat kegiatan KRPL itu sendiri. sedangkan pelatihan dilakukan untuk aksi kegiatan KRPL itu sendiri, meliputi pelatihan penanaman dan perawatan tanaman hingga ternak. Dalam pelaksanaan sosialisasi hingga pelatihan, BPTP Provinsi Jawa Timur melakukannya selama 1 tahun yaitu pada tahun 2012 hingga 2013. Hal tersebut membuat penanaman dan perubahan pola pikir ke masyarakat desa masih kurang, sehingga membuat masyarakat desa yang tidak meneruskan kegiatan KRPL setelah masa pendampingan berakhir.

Pemerintah Desa Kebontunggul merupakan *stakeholder* pengembang dalam kegiatan KRPL, dimana dalam pelaksanaannya memang dibantu dengan BPTP Provinsi Jawa Timur sebagai perintis dari kegiatan KRPL. Dalam masa perintisan yang dilakukan BPTP, pemerintah desa Kebontunggul ikut membantu mengkoordinir



masyarakatnya yang akan diikuti pada kegiatan pelatihan tersebut. Serta memberikan fasilitas tempat. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu (Ri) Pelatih bahwa:

“dari pak kades atau pemerintah desa ketika pelatihan sebenarnya mendukung aja sih mbak, kita kalau tidak dibantu beliau-beliau perangkat desa kita kesusahan mendekati petani itu, fungsinya perangkat desa kan mengkoordinir misalkan ada pelatihan pak kasunya yang disuruh, tapi kita kan selalu diskusi sama pak kades sama perangkat desanya sebentar, kalau kita ngumpulin sendiri ndak mungkin, biasanya tempat pelatihan kadang di balai desa kadang di rumahnya petani-petani giliran tapi kebanyakan di rumahnya kepala dusun.” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.36 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Kelompok KRPL membawa pengaruh penting dalam fasilitas pemberdayaan pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pengembang dari kegiatan KRPL itu sendiri.

Terkait pendidikan dan pelatihan keanggotaan pelaku KRPL. Kelompok KRPL yang merupakan wadah mempunyai fungsi terkait dengan penambahan wawasan serta pemecahan masalah dari pelaku KRPL yang merupakan anggota dari Kelompok KRPL itu sendiri. setiap bulanya Kelompok KRPL mengadakan pertemuan sesama anggota sebagai upaya meningkatkan kemampuan masing-masing anggota. Salah satunya adalah melalui Kelompok KRPL memberikan fasilitas dalam meningkatkan kemampuan SDM. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Ketua KRPL (SA) Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“Fungsinya Kelompok KRPL ini juga fokus pada kemampuan sesama anggota, jadi ditingkatkan gitu. Seperti biasanya setiap bulan kan selalu ketemu setiap tanggal 25 biasanya ngomongin masalah awal nanam bibit, kemudian kadang dari mitra pemerintah desa atau dari anak-anak mahasiswa memberikan pelatihan kayak bagaimana mengelola hasil dari KRPL seperti itu. Kadang juga dari ibu-ibu habis ada pelatihan diluar kemudian membagikan informasi ke kita pas pertemuan itu. Jadi kita tampung nantinya kemudian kita pakai kalau sekiranya bisa buat inovasi-inovasi. Kan dulu ada pelatihan dari BPTP itu dibantu buat benih nanam kemudian manen. Sekarang



kami bisa buat kripik-kripik kemudian ada juga jamu dari tanaman toga itu.”
(wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 09.25 WIB di Kantor Desa
Kebontunggul)

Guna untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Kawasan Rumah Pangan

Lestari dan terpenuhinya tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Kawasan Rumah

Pangan Lestari ini seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa

Kebontunggul dan mendapatkan tambahan penghasilan. Pemerintah Desa

Kebontunggul melakukan berbagai upaya pendidikan dan pelatihan baik dari bantuan

mahasiswa KKN kemudian dengan melakukan delegasi kepada salah satu masyarakat

untuk mengikuti pelatihan kemudian juga dari BPTP Provinsi Jawa Timur yang

membantu melakukan pelatihan diawal pembentukan Kawasan Rumah Pangan

Lestari di Desa Kebontunggul. Dari hasil pendidikan dan pelatihan yang dilakukan

pemerintah Desa Kebontunggul, anggota dari kelompok KRPL tidak hanya mampu

menjual tanaman yang masih dalam polibeg saja melainkan juga yang sudah diolah.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dari hasil wawancara ketua kelompok

KRPL dapat diketahui bahwa anggota kelompok KRPL mampu untuk mengolah hasil

KRPLnya seperti menjadi kripik-kripik dan serbuk jamu dari tanaman toga. Sejalan

dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok KRPL, Kepala Desa

Kebontunggul juga menjelaskan terkait pendidikan dan pelatihan yang merupakan

fasilitas pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kebontunggul untuk

melaksanakan kegiatan pemberdayaan yaitu KRPL. Kepala Desa Kebontunggul

menyampaikan bahwa:



“jadi dari pemerintah desa berusaha untuk mendampingi dan melatih masyarakat yang memang mau untuk maju. Seperti anggota KRPL itu mereka senang sekali pas diajak untuk pelatihan dan bersama-sama bangun KRPL ini. Dari pemerintah desa berusaha untuk membangun kemitraan dengan pihak luar Desa Kebontunggul untuk menambah wawasan masyarakat, seperti adanya pelatihan dan pendidikan dari BPTP Provinsi Jawa Timur ini menanam benih kemudian merawat hingga panen serta mengolahnya. Kemudian dari anggota KRPL yang kami nilai memang ulet dan rajin kami suruh ikut pelatihan-pelatihan di luar, nanti balik lagi kan ada pertemuan rutin itu jadi disitu dibagikan informasi-informasi itu. Kami sekali lagi hanya memberikan fasilitas lanjutnya masyarakat sendiri yang nantinya akan melaksanakan. Kemudian anak-anak mahasiswa yang KKN disini juga seringkali saya suruh untuk memberikan wawasan pelatihan kecil-kecilan lah siapa tau bisa dimanfaatkan. Ditambah lagi sebenarnya ibu-ibu sudah membawa bakat sendiri seperti kan memasak mereka kan paham itu. Paling kita yah hanya mengarahkan saja sama memberikan motivasi-motivasi. Hasilnya bisa nanti dijual seperti tortila, kemudian tepung-tepung, samiler sama tanaman toga itu.” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.20 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Pemerintah Desa Kebontunggul selaku wakil dari masyarakat yang telah mendapatkan mandat untuk melakukan pemberdayaan, sudah melaksanakan peranya dalam memberikan pemberdayaan guna meningkatkan sumber daya manusia pelaku kegiatan pemberdayaan yaitu kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Bentuk peningkatan sumber daya manusia pelaku kegiatan KRPL dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat kelompok tani dan anggota dari Kelompok KRPL, yang terseruktur dalam pertemuan rutin anggota KRPL pada tiap bulanya tanggal 25. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh anggota Kelompok KRPL (NG) Desa Kebontunggul yang menjelaskan bahwa:

“saya tau KRPL itu kan dari pelatihan mbak, kan dari provinsi itu saya diajari nanam bibit kemudian rawat. Kemudian mereka berharap diteruskanya kegiatan ini. Saya juga seneng aja kan ya dari sini kami kalau butuh cabe pas dulu cabe mahal saya tidak ikut merasakanya. Terus kadang kalau ada pertemuan mbak kan ada pertemuan tanggal 25 itu, kadang ada mahasiswa



yang datang memberikan pengarahan, kadang juga ada ibu-ibu yang bergantian. Kadang dari pemerintah desa kan kerjasama mbak sama dinas-dinas gitu jadi salah satu dari anggota diajak ikut pelatihan lalu ilmunya ya dikasih lagi ke kelompok KRPL.” (wawancara Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 08.19 WIB di rumah anggota Kelompok Wanita Tani pelaksana KRPL di Desa Kebontunggul)

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh salah anggota KRPL yang pernah diikutkan pelatihan dan menganggap bentuk usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kebontunggul sudah cukup baik. Anggota KRPL tersebut merasa mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pelatihan dan pendidikan dari Pemerintah Desa Kebontunggul. Pendapat tersebut diungkapkan oleh (DA) anggota Kelompok KRPL yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah diikutkan diacara pelatihan di Kabupaten sama orang balai desa, dari situ saya belajar tentang mengolah hasil tanaman saya. Kemudian ketika pertemuan saya diwajibkan untuk membagi kepada sesama anggota. Kemudian pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan mendatangkan mahasiswa yang memperkenalkan kita pada alat-alat buat mengolah hasil KRPL juga sangat baik. Saya sebagai anggota KRPL mempunyai semangat yang tinggi jadinya ketika ada pendidikan dan pelatihan itu. Soalnya itu berhubungan sama pengolahan. Salah satunya seperti pengolahan umbi-umbian dibuat kripik pakai alat potong jadi saya tidak perlu motong-motong pakai ladeng (pisau) lagi kan jadinya hemat waktu. Jadi ya kalau ngomongin pelatihan sama pendidikan yang saya rasakan ya cukup maksimal soalnya saya juga merasakan dampaknya sendiri.” (wawancara Tanggal 3 Juni 2017 Pukul 09.29 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Kesimpulan yang bisa diambil dari berbagai penjelasan dan pernyataan diatas menyatakan bahwa, dalam meningkatkan sumber daya manusia pelaku kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul telah memberikan kontribusi dengan memberikan fasilitas pemberdayaan berupa pendidikan dan pelatihan. Bentuk pendidikan dan pelatihan



dari BPTP dengan sosialisasi dan pelatihan terkait kegiatan KRPL. Sedangkan yang dilakukan pemerintah Desa Kebontunggul dilaksanakan dengan mendatangkan mahasiswa KKN serta mengikut sertakan anggota KRPL yang dinilai mempunyai semangat tinggi untuk belajar mengikuti pelatihan yang diadakan oleh organisasi diluar pemerintah desa yang masih berhubungan dengan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pendidikan dan pelatihan juga dilakukan melalui organisasi Kelompok KRPL yang pada setiap bulanya pada tanggal 25 dengan dipantau pemerintah desa mengadakan pertemuan dengan agenda *sharing* informasi yang mendatangkan manfaat bisa berupa penambahan wawasan. Dengan adanya fasilitas pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dengan agenda rutin dilaksanakan melalui organisasi Kelompok KRPL tersebut akan mempermudah bagi pelaku Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi perkembangan KRPL di Desa Kebontunggul. Namun dalam pelaksanaannya masih belum mencakup keseluruhan masyarakat Desa hanya yang tergabung dalam Kelompok KRPL saja.

c. Kemampuan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu inti dari suatu usaha. Saat ini perkembangan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Kebontunggul melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja melainkan juga dikembangkan sebagai sarana usaha yang akan mengantarkan anggota KRPL memiliki omset yang akan mampu menambah



penghasilan. Pada dasarnya saat ini pemerintah Desa Kebontunggul mengarahkan masyarakat anggota KRPL untuk mengelola hasil dari KRPLnya untuk dibentuk sebagai produk olahan yang berdaya jual tinggi. Sehingga harapannya ialah untuk menambah penghasilan masyarakat sekalipun relatif kecil. Untuk mendukung usaha pemerintah Desa Kebontunggul terkait pengolahan, kemampuan pemasaran saat ini menjadi hal yang pokok yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Desa Kebontunggul dan masyarakat anggota KRPL itu sendiri.

Terkadang minimnya kemampuan pemasaran sangat berpengaruh pada perkembangan usaha atau kegiatan dan tak terkecuali kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang saat ini dikembangkan sebagai produk unggulan Desa Kebontunggul. Bahkan kemampuan pemasaran yang minim bisa menjadi faktor penghambat dalam merintis serta menjalankan suatu usaha atau industri. Pemerintah Desa Kebontunggul mengakui bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yaitu kegiatan KRPL ini yang berkaitan dengan kemampuan pemasaran. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Kebontunggul yang mengatakan bahwa:

“pada dasarnya KRPL ini kan sifatnya untuk pemanfaatan ya, pemanfaatan tanah pekarangan yang kosong untuk supaya bisa berdaya. Artinya kegiatan kelompok wanita tani ini bisa juga diluar KRPL ini untuk tambahan penghasilan dan untuk menambah kegiatan diluar kegiatan yang semestinya. Dari pemerintah desa juga mengarahkan untuk membuat produk-produk dari hasil KRPL nah ini yang disebut kegiatan diluar KRPL. Saya jelaskan sebelumnya kalau kami dari pemerintah desa juga mendatangkan beberapa orang untuk pelatihan. Disini kami juga mengadakan pelatihan untuk membuat lebel cara mengemas sehingga bisa lebih mudah untuk dipasarkan. Tapi kami terkena kendala dari produk unggulan yang dibuat tadi jadi masih belum bisa untuk teknik pemasarannya sehingga ini juga sebagai hambatan,



karena dengan pemasaran itu terhambat, sehingga yang tujuannya untuk menambah penghasilan akhirnya sementara ini berhenti dulu begitu.” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.29 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Berkaitan dengan permasalahan terkait dengan pemasaran yang sudah dijelaskan diatas, pemerintah Desa Kebontunggul tidak lepas tangan begitu saja.

Melainkan mencari titik temu permasalahan sehingga menghasilkan beberapa inovasi pemasaran untuk produk-produk unggulan dari hasil kegiatan Kawasan Rumah

Pangan Lestari tersebut. Pada dasarnya Desa Kebontunggul diuntungkan dengan adanya gelar Desa unggulan yang diterimanya baik dari Kabupaten Mojokerto hingga

Provinsi Jawa Timur. Dari situ membantu mengenalkan adanya produk-produk unggulan milik Desa Kebontunggul. Kemudian juga karena merupakan salah satu

Desa di Jawa Timur yang sering kali menang kejuaraan, Desa Kebontunggul dijadikan tempat untuk mahasiswa KKN disana untuk membagikan wawasan dan

mengambil wawasan juga. Kemudian ada juga dari beberapa instansi yang melakukan *study banding* ke Desa Kebontunggul. Hal tersebut dijadikan terobosan bagi

pemerintah Desa Kebontunggul untuk mencari jalan keluar atau inovasi terkait dengan ketrampilan dalam pemasaran produk unggulan tersebut.

Pemerintah Desa Kebontunggul memunculkan terobosan untuk menggunakan website serta blogger yang berbasis internet dalam memasarkan produk unggulannya.

Website yang terintegrasi tersebut dikerjakan pemerintah Desa Kebontunggul dengan bantuan dari mahasiswa yang KKN di Desa Kebontunggul itu sendiri. hal tersebut

diungkapkan oleh Kepala Desa Kebontunggul yang menyampaikan bahwa:



“ini dari desa mencoba untuk memasarkan produk melalui online, jadi desa sekarang sudah menyediakan fasilitas penjualan online. Sumber daya yang mampu kita latih. Ada website tersendiri sudah yang dibentuk untuk pemerintah Desa Kebontunggul. Pembuatannya dari pemerintah desa didampingi sama anak-anak mahasiswa ketika KKN disini. Sehingga saya memanfaatkan saya suruh membuat website saya suruh membuat blog. Sehingga nantinya dari masyarakat bisa memanfaatkan. Kami sudah menyediakan perlengkapan onlinenya dari mulai wifi sampai perangkat pendukungnya juga. Jadi ini nanti untuk mempermudah pemasaran yang lebih baik lebih modern.” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.34 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Kebontunggul terkait pemasaran dilakukan dengan melakukan pemasaran online. Pemerintah Desa Kebontunggul dibantu dengan para mahasiswa merintis website berbasis internet yang bisa digunakan masyarakat untuk memasarkan produknya secara online. Hal tersebut nampak menarik karena keinginan serta terobosan yang baik dari pemerintah Desa Kebontunggul yang mengharapkan masyarakat desa dan produk unggulannya untuk maju. Selama ini memang sudah dikatakan cukup banyak yang membeli produk KRPL namun untuk harapan yang lebih besar lagi pemerintah Desa Kebontunggul memberikan fasilitas pemasaran melalui website. Hal tersebut seakan menegaskan eksistensi dari Desa Kebontunggul beserta produk unggulannya. Sehingga seiring berjalanya waktu diharapkan terobosan dari pemerintah Desa Kebontunggul tersebut bisa memberikan kesempatan bagi pelaku kegiatan KRPL memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

Pada dahulunya sebelum ada terobosan menggunakan IT tersebut pemerintah Desa Kebontunggul menggunakan usaha pertemuan-pertemuan yang diadakan pada dinas-dinas serta acara ibu PKK atau pertemuan di Kecamatan untuk



memperkenalkan produk unggulan Desa Kebontunggul. Dari upaya tersebut dinas-dinas terkait serta beberapa instansi sekolah hingga kepolisian menjadi salah satu pelanggan tetap KRPL Desa Kebontunggul untuk penjualan tanaman yang ada di Polibek saja, bukan olahan dari KRPL. Biasanya KRPL yang masih dalam polibek dipakai untuk hiasan di dinas-dinas tersebut, kadang juga dipakai ketika ada tim penilaian serta kedatangan tamu-tamu penting. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KRPL (SA) yang menyatakan bahwa:

“Pemasaran dari kami sebenarnya terbatas, jadi kalau ada acara-acara ibu-ibu PKK atau kadang ada pertemuan di Kecamatan, itu kita bantu pasarkan. Kita kenalkan ada produk KRPL. Ini yang sudah diolah. Tapi yang paling laris itu tanaman yang di polibek. Soalnya itu kan kelihatan seger. Jadi dinas-dinas kadang ada yang dari sekolah-sekolah mau ada tim penilai atau kadang ada tamu mereka beli ke kita. Biar kelihatan bagus. Memang pemasarannya sebatas itu dulu. Kalau sekarang kan ada online itu. Dampaknya lumayan bagus banyak yang study banding disini. Kemarin bahkan ada yang dari luar jawa kesini mbak buat liat KRPL kita. Ya lumayan dikenal sekarang KRPL kita. Tapi yang bisa online terbatas mbak jadi tidak semua masyarakat di pemerintah desa aja cuman ada 2 orang yang bisa pak lurah sama kaur pemerintahan. Jadi selama ini masih dipegang pak lurah sama kaur pemerintahan. Dulu kan itu ada gara-gara pak lurah minta tolong anak-anak kkn setelah itu dikasih ke pemerintah desa.” (wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 09.40 WIB di Kantor Desa Kebontunggul)

Sedangkan menurut salah satu anggota KRPL merasa bahwa pemasaran yang dilakukan memang masih kurang. Namun juga memberikan apresiasi kepada upaya dari pemerintah desa untuk menggunakan sistem online dalam memperkenalkan hasil olahan KRPLnya. Hal tersebut karena dinilai membawa dampak yang lebih baik terkait penambahan pelanggan. Anggota KRPL (NG) mengungkapkan hal tersebut bahwa:



“biasanya saya jual di dinas-dinas yang beli terus ada sekolah-sekolah gitu. Tapi saya usaha memasarkannya memang saya nilai diri saya sendiri masih kurang. Istilah e jagakno wong deso mbak (menggantungkan pada usaha pemerintah desa). Biasanya dari ibu-ibu kan ada pertemuan-pertemuan itu, dari bu lurah kemudian ibu ketua KRPL itu kadang ada pertemuan di Surabaya atau Malang. Pokja-pokja gitu mbak ya dari situ mereka memperkenalkan KRPL kami. Kemudian saya tau kalau ada yang pake internet itu lumayan membantu juga sekalipun saya sendiri tidak bisa menggunakannya, saya aja Cuma bisa pake *Whatsapp* aja lainnya saya suruh anak saya. Tapi usahanya pak lurah saya akui bagus wong ada sampai luar jawa mbak yang kesini beli itu.” (wawancara Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 08.29 WIB di rumah anggota Kelompok Wanita Tani pelaksana KRPL di Desa Kebontunggul)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dahulunya fasilitas pemberdayaan yang menyangkut pemasaran produk KRPL baik olahan maupun yang masih dalam bentuk tumbuhan polibeg, menggunakan pertemuan-pertemuan yang tidak tentu rutin diselenggarakan sehingga dinilai masih kurang. Namun kemudian Pemerintah Desa Kebontunggul memunculkan inovasi terkait dengan strategi pemasaran yaitu dengan memperkenalkan melalui online. Alamat website yang digunakan bisa dilihat melalui www.kebontunggul.com. Dari upaya tersebut pemerintah Desa Kebontunggul mendapatkan respon yang positif. Baik dari masyarakat anggota KRPL dan juga masyarakat calon pembeli produk olahan KRPL dan tanaman KRPL. Anggota KRPL menganggap bahwa dengan adanya online bisa membantu memperkenalkan produk KRPL itu sendiri, terlepas keadaan dari anggota KRPL yang minim akan kemampuan teknologinya. Namun tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah Desa Kebontunggul patut untuk di apresiasi. Sedangkan dari sisi masyarakat calon pembeli, mampu untuk mengenali KRPL Desa



Kebontunggul dan sekarang tidak sebatas di area Jawa Timur saja melainkan sampai di luar Jawa. Dengan bantuan website online milik pemerintah desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Geografis yang Sesuai dengan Kegiatan KRPL

Pemberdayaan melalui kegiatan KRPL ini pada dasarnya adalah kegiatan pemberdayaan pertanian dengan menggunakan pemanfaatan pekarangan masyarakat. Pertanian yang bagus sudah menjadi hal yang wajar apabila memiliki kondisi geografis yang memungkinkan untuk pertanian itu sendiri. Sehingga kondisi geografis sangat berpengaruh menjadi bentuk dukungan tersendiri bagi keberhasilan pemberdayaan melalui kegiatan KRPL ini. Desa Kebontunggul berada pada ketinggian 300m dari permukaan laut dan memiliki luas pertanian 142.220 Ha, kemudian mayoritas warganya juga menghasilkan melalui kegiatan pertanian. Hal tersebut ditunjang dengan kondisi Desa Kebontunggul yang juga dikategorikan salah satu desa yang terletak pada dataran tinggi di Kabupaten Mojokerto.

KRPL masih identik dengan kegiatan pertanian konvensional, hanya saja penempatan untuk kegiatan bercocok tanamnya dilakukan bukan diladang melainkan di pekarangan. Dan yang membedakan lainnya ialah tanaman yang ditanam bukanlah padi oleh sebab itu KRPL juga disebut sebagai usaha pertanian non beras guna menganekaragamkan pangan. Kemudian sasarannya ialah para wanita. Kegiatan KRPL yang sama dengan pertanian ladang pada umumnya bisa dijelaskan melalui kegiatan



tanam benih, pemupukan, kemudian perawatan hingga proses pemanenan. Oleh sebab itu banyak kebutuhan untuk kegiatan KRPL yang sama dengan kegiatan pertanian pada umumnya.

Terdapat beberapa kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan pertanian dan juga kegiatan KRPL yang umum, antara lain kondisi tanah yang subur, cuaca yang tidak terlalu panas, kemudian tersedianya air yang memadai. Desa Kebontunggul memiliki kondisi tanah yang lumayan subur dengan tinggi rata-rata dari permukaan laut dusun terendah mencapai 400m sedangkan untuk tertinggi berada pada 700m. Desa Kebontunggul juga memiliki suhu rata-rata terpanas mencapai 32°C. Kemudian Desa Kebontunggul juga dilewati 2 buah sungai besar yaitu sungai Pikatan dan sungai Landean. Kondisi geografis Desa Kebontunggul yang sesuai dengan kegiatan KRPL dan mempermudah pelaksanaan kegiatan KRPL juga dijelaskan oleh peneliti Ibu (RI) dari BPTP Provinsi Jawa Timur yang melakukan pemberdayaan melalui kegiatan KRPL waktu itu, bahwa:

“kalau di kebontunggul sebenarnya bagus, karena lokasinya agak diatas, air ndak susah, jadi mendukung kan itu untuk dilakukan tanam menanam. Sedangkan dulu di trowulan itu susah mbak airnya kan kondisinya dataran rendah” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.41 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Pemberdayaan melalui kegiatan KRPL pelaksanaannya memang sangat dipengaruhi kebutuhan pokok tersebut. Kondisi air yang melimpah juga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan KRPL. Pemerintah Desa Kebontunggul bahkan juga bekerjasama dengan Desa Gumeng untuk memasok air apabila Desa Kebontunggul kurang air. Namun selama ini masih belum merasakan adanya



kekurangan air untuk kegiatan bercocok tanam termasuk pelaksanaan kegiatan KRPL. Untuk itu kondisi geografis ini juga yang berdampak pada kemudahan pemberdayaan melalui pelaksanaan kegiatan KRPL itu sendiri. Faktor pendukung yang berkaitan dengan kondisi geografis ini juga dijelaskan oleh Ibu (SA) selaku

Ketua dari Kelompok KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“kenyataannya desa masih kaya air tuh mbak, untung saja air itu ndak susah. Desa juga sudah jaga-jaga dengan kerjasama dengan desa gumeng. Kemudian seperti yang mbak liat banyak sekali sawah disini, terus setiap rumah-rumah pasti ada tanamannya, sungai tinggal jalan kebelakang aja ada, airnya nyala terus. Jadi kegiatan pertanian memang cocok disini makanya itu dari kabupaten ya nunjuknya ke Desa Kebontunggul kalau kegiatannya berkaitan sama tanam menanam”. (wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 10.11 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Desa Kebontunggul memang sering mendapatkan dana untuk pengembangan kegiatan yang masih berbasis kegiatan tanam menanam, misalkan saja

Desa Toga. Hal tersebut mengingat kondisi geografis Desa Kebontunggul yang sangat mendukung kegiatan tanam menanam. Kondisi geografis berhubungan dengan

pemberdayaan melalui kegiatan KRPL bisa dilihat dari, penghematan dana guna mencari bahan-bahan pertanian, juga sebagai motivator bagi masyarakat desa, bahwa

KRPL ini tidak susah untuk dilaksanakan, semua kebutuhan sudah ada tinggal minat masyarakatlah yang perlu dikembangkan. Kondisi geografis yang mendukung juga

dapat untuk menghemat pengeluaran modal dalam kegiatan KRPL itu sendiri. hal tersebut dijelaskan oleh Bapak (SI) Kepala Desa Kebontunggul, bahwa:

“disini bagus memang dan cocok untuk kegiatan pertanian, makanya itu desa kebontunggul kan juga disebut lumbung padi. Banyak program-program pemerintah yang memang untuk kegiatan pertanian diarahkan ke



kami. Sebenarnya tinggal masyarakat yang mau berkembang saja. Modal awal kita sudah punya. Gampang misal mau nanem apa aja disini untuk tumbuh, udara juga masih asri” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.39 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Pemberdayaan memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat desa yang masih memerlukan motivasi untuk berkembang. Sedangkan Desa Kebontunggul pada dasarnya sudah memiliki potensi alamiah berupa kondisi geografis yang memadai kegiatan pertanian. Bentuk pemberdayaan dengan memanfaatkan pertanian seperti kegiatan KRPL ini memang sangat dibutuhkan kondisi geografis yang memadai.

Sehingga dalam praktek kegiatan lapangan cocok tanamnya tidak banyak menemukan kendala. Serta biaya kegiatan juga lebih bisa diminimalisir untuk motivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan KRPL itu sendiri. Alasan kondisi geografis bisa membentuk semangat disebabkan oleh tidak banyaknya tantangan dalam kegiatan bercocok tanam karena kesesuaian kebutuhan pokok, misalnya tanah yang subur serta air yang cukup. Juga penghematan modal karena tidak perlunya pengemburan tanah supaya subur serta membeli air karena kurangnya air.

2) Desa Kebontunggul Menjadi Desa yang Sering Mendapatkan Kunjungan

Pemberdayaan dikenal dengan salah satu upaya yaitu pemasaran. Dalam kegiatan KRPL pemasaran juga dibutuhkan untuk menambah penghasilan masyarakat serta penunjang untuk modal keberlanjutan kegiatan. Desa Kebontunggul sebagai desa yang sering mendapatkan kunjungan dari beberapa desa yang lain, membawa dampak yang baik bagi pemasaran kegiatan KRPL. Awal mula Desa Kebontunggul



menjadi desa kunjungan disebabkan oleh banyaknya penghargaan yang diterima oleh Desa Kebontunggul itu sendiri. Kemudian membawa pada ambisi Desa Kebontunggul menjadi rujukan desa wisata bagi pemerintah desa lain untuk melakukan study banding. Penghargaan yang diperoleh Desa Kebontunggul berasal dari rintisan toga serta keaktifan Ibu-ibu PKK dalam menjalankan tugasnya. Desa Kebontunggul juga dikenal sebagai desa yang sering untuk ikut serta dalam lomba, misalkan kompetisi desa yang diadakan Fakultas Ilmu Administrasi.

Desa Kebontunggul yang sudah dikenal dengan keberhasilan yang dicapainya menjadikan Desa Kebontunggul sebagai rujukan untuk desa lain melakukan *studybanding*. Dari situ pemerintah Desa Kebontunggul memanfaatkan untuk memperkenalkan produk unggulanya dan untuk memasarkan produk-produk hasil masyarakat Desa Kebontunggul itu sendiri. Dari beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto juga mengenal produk-produk Desa Kebontunggul berdasarkan lomba-lomba yang sering diikuti dan dikenalnya Desa Kebontunggul sebagai desa Unggulan di Kabupaten Mojokerto. Beberapa instansi pemerintah juga menjadi langganan tetap produk KRPL non olahan seperti tanaman sayur yang masih dalam polibeg. Sedangkan untuk beberapa pemerintah desa lain yang melalkukan study banding biasanya mereka lebih tertarik pada olahan KRPL dan juga non olahan.

Desa Kebontunggul yang dikenal sebagai desa rujukan membawa dampak yang bagus bagi upaya pemberdayaan kegiatan KRPL yaitu pada bagian pemberdayaan pemasarnya. Pemerintah dibantu dari situ dengan memberikan branding serta pengenalan pada masyarakat diluar desa Kebontunggul itu sendiri,



bahwa di Desa Kebontunggul memiliki produk unggulan yang baik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak (SI) sebagai Kepala Desa Kebontunggul, bahwa:

“jadi memang banyak kunjungan study banding ke desa kami baik dari pemerintah desa lain juga dari instansi-instansi pemerintah, seperti dari POLRI, TNI hingga dinas pendidikan sekaligus ada banyak yang pesan kaitanya dengan bibit sayur atau buah bahkan juga ada yang pesan produk olahan seperti jamu juga produk-produk yang lain. Nah itulah salah satu cara kita untuk lebih terkenal lagi, karena apa yaitu dengan kunjungan study banding itu orang yang datang kesini akan menyebarkan informasi bahwa Kebontunggul merupakan salah satu rujukan laboratorium sosial untuk belajar bersama, sehingga tidak menutup kemungkinan desa diluar Kabupaten Mojokerto juga banyak yang berkunjung kesini. (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.43 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)”

Desa Kebontunggul yang sudah dikenal masyarakat melalui keikutsertaan dalam setiap lomba desa yang sering diadakan baik dari Provinsi Jawa Timur hingga nasional, membawa dampak yang bagus bagi pemesanan tanaman KRPL. Pemesanan tanaman KRPL juga berasal dari beberapa instansi pemerintahan, untuk pemesanan yang sifatnya perorangan hanya sedikit saja. Namun memang tetap ada tapi dalam jumlah yang relatif sedikit apabila dibandingkan dengan pemesanan dari Instansi pemerintah yang biasanya langsung banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu (SA) selaku Ketua Kelompok KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“biasanya yang beli itu ya mbak dari ibu-ibu polisi, kemudian dari beberapa dinas-dinas itu juga beli ke kita 1 mobil pikep itu kalau lagi borong mbak, makanya itu masyarakat lebih suka buat yang masih polibegan soalnya laku kalau yang produk olahan itu susah lakunya mbak. Kan banyak juga mbak yang studi banding disini kemarin ada mbak dari Maluku kalau ndak salah kesini, biasanya mereka beli produk-produk kita. Kadang ada bazar ketika lomba-lomba kan sering sini ikut lomba mbak dan menang”. (wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 09.19 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)



Desa Kebontunggul yang sering dijadikan lokasi dari desa lain untuk melakukan pembelajaran serta mencontoh dari Desa Kebontunggul memberikan ide untuk menjadikan Desa Kebontunggul sebagai desa wisata. Tapi saat ini masih belum terlaksana mengingat dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Desa Kebontunggul sebagai desa yang banyak dikunjungi membawa motivasi masyarakat untuk terus melakukan kegiatan KRPL. Sekalipun pemasaran masih terbatas namun untuk pemasaran dari tanaman KRPL yang masih polibeg masih sangat banyak. Untuk itu seiring berkembangnya Desa Kebontunggul menjadikan KRPL Desa Kebontunggul dikenal dalam masyarakat. Kemudian untuk tanaman olahanya juga dari tanaman toga juga masih sangat diminati oleh masyarakat yang melakukan kunjungan. Antusiasme dari beberpa kunjungan membawa ide Desa Wisata, juga diungkapkan oleh Ibu (RI) peneliti dari BPTP Provinsi Jawa Timur, bahwa:

“jadi dari kreatifitas pak kepala desa dijadikan sebagai desa wisata jadi kan masyarakat bisa mengenal, orang datang kesitu bisa beli toga obat-obatan nah sebenarnya pola pikirnya bagus tapi kan ndak ada support, kemarin katanya juga mau gandeng LSM tapi sampek kapan toh LSM juga dapat bantuan dari laur negeri jadi saya suruh buat sendiri dulu. Untuk sekarang masih mengandalkan kunjungan dari masyarakat yang mengenal Desa Kebontunggul sebagai desa unggulan banyak juga tuh yang melakukan kunjungan” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.49 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Selama ini, pemasaran memang menjadi kendala tersendiri bagi kegiatan KRPL di Desa Kebontunggul, namun dengan dikenalnya Desa Kebontunggul sebagai Desa Unggulan yang sering menang pada lomba-lomba tingkat Provinsi hingga nasional membawa banyak kunjungan dari masyarakat luar. Sehingga masyarakat Desa Kebontunggul juga bisa untuk melakukan pemasaran produk KRPLnya.



b) Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Partisipatif dan Memiliki Keahlian Rendah

Wilayah pedesaan seringkali diidentifikasi dengan kondisi mayoritas masyarakat yang masih mempertahankan tradisi namun cenderung memiliki pendidikan yang masih rendah. Sasaran utama dalam upaya pemberdayaan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Sehingga apabila SDM kegiatan KRPL itu rendah dan masih belum sepenuhnya sadar untuk melaksanakan kegiatan akan menjadi salah satu yang menghambat dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan KRPL, masih tergolong sulit untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berkembang, karena kurangnya kreatifitas dan kemandirian dari masyarakat sehingga ingin dibantu dan didampingi secara terus-menerus juga terkait penerimaan pengetahuan baru.

Pelaksanaan pemberdayaan melalui kegiatan KRPL pada masyarakat Desa Kebontunggul juga mengalami kondisi hambatan dimana kualitas sumber daya masyarakat menjadi masalah. Pola pikir beberapa masyarakat yang masih belum mau untuk ikut serta dalam kegiatan KRPL memabawa dampak yang buruk bagi semangat beberapa masyarakat lain yang masih berkeinginan untuk berkembang. Pada era perkembangan jaman yang pesat serta era digital yang semakin berkembang menuntut masyarakat untuk lepas menjadi objek pembangunan. Namun pola pikir masyarakat yang tidak mau berkembang tersebut menghambat usaha untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam kasus



pelaksanaan pemberdayaan melalui kegiatan KRPL pemerintah sebagai pemberdaya sudah berusaha sekreatif mungkin namun ironisnya masyarakat sebagai sasaran masih kurang terbuka untuk melakukan kegiatan KRPL. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti dari BPTP Provinsi Jawa Timur Ibu (RI), bahwa:

“kalau di kebontunggul sebenarnya bagus tapi kadang ibu-ibu kalau disuruh nyirami itu ndak ada, ya ibu-ibu sekarang pilih ndak mau soro (susah) pilih beli padahal sebenarnya manfaatnya banyak dek, tapi ya itulah merubah pola pikir itu susah. Jadi kemarin yang kami sesalkan sama pak andi (kepala desa kebontunggul) setelah lomba selesai tidak ada pengawalan, dibiarkan saja kemudian pak andi yang sendirian menghadapi warganya ada yang mau ada yang nggak jadikan turun, awalnya sih bagus mbak. kreatifitas dari pemerintah desa juga bagus, kan dibangunkan berem mbak jadi kan dulu awalnya cuman ada polibeg polibeg itu dari situ kan bagus jadi kita ndak repot kita ndak perlu lagi naruh-naruh media di polibeg, sebenarnya idenya sudah bagus tapi masyarakatnya kurang greget.” (wawancara tanggal 7 Juni 2017 pukul 10.56 WIB di Kantor BPTP Provinsi Jawa Timur)

Masyarakat desa atau secara spesifik kelompok wanita tani merupakan sasaran untuk pemberdayaan melalui kegiatan KRPL. Namun sangat disayangkan apabila keinginan baik dari pemerintah tidak dibarengi dengan niat perubahan dari masyarakat itu sendiri. keberhasilan kegiatan akan tercapai apabila masyarakat antusias terhadap kegiatan tersebut. Namun apabila sebaliknya suatu kegiatan sudah dipastikan tidak akan berjalan. Penanaman pola pikir guna perubahan yang lebih baik memang sudah menjadi tugas dari pemerintah itu sendiri. Namun lebih baik lagi apabila tugas tersebut dibantu dengan masyarakat, pada dasarnya masyarakat juga mempunyai tugas tidak tertulis yaitu mensejahterakan dirinya sendiri. apabila memahami tugas tersebut dengan baik, sudah menjadi kewajiban apabila kegiatan



pemerintah akan berhasil. Karena pada dasarnya kegiatan tersebut memang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan KRPL di Desa Kebontunggul pada awalnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat desa, namun seiring berjalannya waktu keanggotaan KRPL Desa Kebontunggul mengalami penurunan. Hal tersebut diketahui disebabkan oleh beberapa masyarakat yang enggan untuk menerima kegiatan KRPL juga kualitas dari SDM yang rendah yang berpengaruh pada tingkat inovasi dan kreatifitas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak (SI) Kepala Desa Kebontunggul, bahwa:

“ada beberapa masyarakat yang memang tidak ikut memberikan bentuk tidak semangat ngembosi gitu, supaya apa alah kegiatan gitu. Jadi orang-orang cenderung meremehkan kegiatan padahal ini sebenarnya penting sekali. Jadi hambatan karena apa dari lingkungan, lingkungan internal ini yang menjadi hambatan besar. Jadi masyarakat yang memang tidak ikut dalam kegiatan kelompok masyarakat sehingga kadang-kadang mencoba untuk mempengaruhi supaya tidak ikut kegiatan di KRPL itu. Kemudian kreativitas serta tingkat kemandirian masih rendah jadi selalu inginya didampingi” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 13.49 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Suatu kegiatan memang tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Dengan upaya pemberdayaan memang dibutuhkan jangka waktu yang tidak singkat untuk merasakan dampak dari pemberdayaan itu sendiri. seperti halnya kegiatan KRPL yang membutuhkan tahap-tahap pemberdayaan, tidak bisa secara langsung atau singkat merasakan dampak positifnya. Untuk itu sudah sepatutnya masyarakat desa dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah tentunya, menjalankan kegiatan KRPL secara maksimal sehingga mampu untuk memberi hasil yang maksimal pula.. Namun permasalahan terjadi apabila masyarakat kurang sabar dalam menunggu hasil



kemudian tidak berkembang dan masih sangat bergantung pada pemerintah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu (SA) selaku Ketua KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“sebenarnya masyarakat disini guyup mbak, kemudian kondisinya juga memungkinkan seperti yang mbak liat sendiri banyak masyarakat kalau misal kita temui di rumahnya. Banyak yang nganggur. Tapi kadang itu masyarakat gak mau susah, masih males gitu tapi kalau sudah liat contoh yang berhasil langsung pada mau. Susah-susah gampang sebenarnya urusan sama masyarakat yang penting disabari saja. Sebenarnya KRPL ini banyak bagusnya mbak misal kita bisa jual cabe buat dampat ikan kan lumayan mbak.” (wawancara Tanggal 31 Mei 2017 Pukul 09.45 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Faktor penghambat BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dalam memberikan pemberdayaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendapat yang disampaikan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul bertolak belakang dengan hambatan pelaku Kegiatan KRPL. mengatakan bahwa hambatan yang dirasakan dalam meningkatkan kegiatan KRPL adalah pemasaran, dan kurangnya modal. Hal tersebut diungkapkan (NG) pelaksana Kegiatan KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“Dalam KRPL saya mengalami hambatan terhadap pemasaran dan tempat modalnya mbak tau sendiri Kebontunggul terpencil jaraknya jauh dari pusat jadi kurang strategis. Mohonlah diperhatikan lagi bagi pemerintah untuk membantu agar KRPL saya banyak yang mengunjungi.” (wawancara Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 08.40 WIB di rumah anggota Kelompok Wanita Tani pelaksana KRPL di Desa Kebontunggul).

Hal serupa disampaikan oleh (DA) salah satu anggota Kelompok KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“Jika hambatan dari sumber daya manusia dan tempat pengembangannya mbak karena saya ingin mengembangkan biar lebih banyak yang beli. Karena



kita tidak bisa berpangku tangan dengan bantuan yang diberikan dari pemerintah saja. Jadi harapan saya tapi pemerintah tetep membanu sama waktu-waktu pelatihan sdm disesuaikan sama kita kalau pagi ndak bisa kan ngurusin keluarga sama dibantu masalah pemasaran biar lebih dikenal lagi.” (wawancara Tanggal 3 Juni 2017 Pukul 09.45 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul).

Dapat diuraikan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dirasakan BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dengan faktor penghambat pelaku Kegiatan KRPL memiliki persamaan dan perbedaan. Jika faktor penghambat yang menjadi kendala BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan pemberdayaan adalah rendahnya kualitas SDM, karena rendahnya sumber daya manusia yang kurang mau kreatifitas akan menghambatnya berjalannya pemberdayaan. Dari faktor penghambat pelaku Kegiatan KRPL adalah dari sisi pemasaran. Maka dari itu harus lebih ditekankan kembali untuk pengadaan pemberdayaan KRPL berkaitan dengan fasilitas pemasaran secara baik.

2) Pemasaran Produk

Kegiatan KRPL pada dasarnya memang bertujuan untuk melakukan penganekaragaman masyarakat yang berguna untuk kesehatan masyarakat. Namun pemerintah juga memiliki tujuan lain atas pelaksanaan kegiatan KRPL ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna menuju kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan peningkatan pendapatan sudah semestinya terjadi apabila terdapat proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku kegiatan KRPL sehingga mendapatkan keuntungan. Selama ini transaksi yang dilakukan oleh pelaku kegiatan KRPL dalam hal ini Kelompok KRPL hanya untuk menukar dengan ikan atau kebutuhan lain yang



dibutuhkan untuk kebutuhan makan keluarga. Kelompok KRPL masih melakukan transaksi sempit yang hampir tidak memunculkan transaksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi sedikitnya transaksi yang dilakukan kelompok KRPL untuk menambah penghasilan disebabkan oleh kurangnya kreatifitas serta inovasi pada bagian pemasaran. Selama ini diketahui bahwa pemasaran dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian pemerintah Desa Kebontunggul melakukan terobosan dengan menggunakan teknologi internet.

Namun masih belum berkembang. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Desa Kebontunggul yang menguasai teknologi. Sehingga sampai saat ini masalah pemasaran produk KRPL terutama produk olahan mengalami kendala.

Disamping memang produk yang masih dalam bentuk tanaman yang masih laku, produk olahan dari KRPL mengalami kemandekan produksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya pesanan dari masyarakat luar sehingga kelompok

KRPL Desa Kebontunggul juga tidak berani untuk melakukan produksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KRPL Ibu (SA) selaku Ketua Kelompok KRPL Desa Kebontunggul, bahwa:

“pemasaran memang menjadi kendala tersendiri mbak, produk olahan KRPL sangat susah untuk mencari mangsa pasar. Mungkin karena produk tersebut labelnya atas nama kelompok KRPL desa jadinya tidak begitu menjual. Mungkin juga karena letak kami memang berada agak jauh dari pusat keramaian. Jadi kadang kita hanya buat pas ada pesanan. Kadang juga kami tolak soalnya kami juga tidak berani mengambil resiko mbak. Dulu ada pesanan sebelum buat serbuk jamu kan kita buat diwadahi plastik seperti aqua gelas gitu. Dari luar jawa banyak tapi kan kita buat alami ndak ada pengawetnya jadi takut basi belum sampai terus basi ya ruginya di kita nanti



namun kepemilikan usaha tersebut bukan lagi milik Kelompok KRPL namun sudah pada perorangan. Pemerintah Desa Kebontunggul juga melakukan terobosan terkait pemasaran produk KRPL melalui website serta blogger, namun masih belum memiliki hasil yang signifikan. Peminat pengunjung memang dapat dikatakan naik namun minat untuk membeli hasil produk olahan dari KRPL masih sangat minim. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak (SI) Kepala Desa Kebontunggul yang menyatakan bahwa:

“Cuma kelemahannya pada pemasaran jadi ketika barang tersebut sudah menjadi produk, jadi kami kesusahan untuk menjualnya. Sebenarnya ini menjadi hambatan juga bagi pemerintah desa. Namun desa tetap memerikan pendampingan terus apa yang menjadi alasan hasil olahan tidak laku, mungkin tidak bisa memberikan hasil tersebut secara umum. Sehingga akhirnya desa menyediakan untuk memperkenalkan produk secara online. Jadi kita latih kita sediakan semua kebutuhan. Sekarang tergantung kemauan dari masyarakat sendiri mau apa tidak untuk berkembang.” (wawancara Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 14.05 WIB di tempat Pembibitan KRPL Desa Kebontunggul)

Pemasaran dari upaya pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting ketika suatu upaya pemberdayaan bertujuan untuk peningkatan pendapatan. Dengan strategi pemasaran yang tepat tujuan peningkatan pendapatan akan menjadi hal yang mungkin, namun sebaliknya apabila suatu kegiatan yang sudah digadag-gadag untuk mampu mengangkat atau menambah pendapatan tidak berhasil akan menjadi pematah semangat masyarakat desa untuk berkembang atau keluar dari pola pikir yang konservatif. Strategi dalam pemasaran pada era digitalisasi serta modern seperti saat ini memang sudah seharusnya mengambil langkah perubahan. Perubahan bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi atau bahkan dengan inovasi produk yang lebih menarik. Juga bisa diambil dengan mengadakan bazar produk-produk KRPL



atau pameran. Namun kembali pada pola pikir masyarakat apakah mau untuk berkembang atau tidak. Kemudian permasalahan branding serta strategi pemasaran sudah sepatutnya untuk memakai pola swasta dalam pemasaran produk.

C. Analisi Data

Tujuan dari Negara Indonesia sendiri terletak pada Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari Negara Indonesia pada pembukaan alenia 4, salah satunya adalah berkaitan dengan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut Indonesia membentuk suatu kerangka kegiatan yang dirancang untuk masyarakat. menurut Rasyid (dalam Soares et al, 2015) pada dasarnya kegiatan yang dilakukan atau yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu, pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Peran pemerintah atau bisa disebut sebagai fungsi pemerintah dikembangkan guna melaksanakan tujuan dari Negara Indonesia. Semua dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan, menumbuhkan kemandirian hingga pada titik memunculkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan kegiatan nasional, masyarakat dikatakan sebagai subjek dari suatu kegiatan dan bukan hanya sebagai objek dari kegiatan seperti yang dahulu. Maksud dari subjek subjek kegiatan mengarah pada partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berujung pada kemandirian masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pemerintah bisa lebih mudah dan cepat tercapai. Mengingat peranan untuk menjaga dan



mewujudkan cita-cita bangsa bukan hanya tugas dari pemerintah saja melainkan juga masyarakat keseluruhan.

1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Indonesia dikenal dengan kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertanian. Namun hal tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memasok kebutuhan pangan dari pertanian asli Indonesia. Padahal pangan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat itu sendiri. Untuk itu pemerintah merancang upaya pemberdayaan dengan fokus kegiatan pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perempuan mengingat peran perempuan yang dinilai masih terbatas terutama pada perempuan pedesaan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan KRPL. Dengan memanfaatkan wanita yang pada umumnya memiliki waktu yang flexibel dan memiliki kesibukan yang relatif terbatas, namun memiliki tingkat ketelatenan dan kesabaran dalam melakukan setiap kegiatan.

Jadi sasaran kegiatan untuk wanita dinilai tepat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap manusia. Sesuai dengan hal tersebut KRPL dinilai sesuai untuk menyediakan pangan setiap keluarga di Indonesia dan bahkan untuk menambah penghasilan setiap keluarga. pada dasarnya peran perempuan pada bidang pertanian bisa digunakan untuk membantu perekonomian, hal tersebut sesuai dengan penelitian Muallif (2013:8) bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan beberapa



66

sektor terutama pertanian, dengan dikembangkan sektor pertanian akan berkembang pula sektor-sektor perekonomian lainnya.

Sasaran kegiatan KRPL adalah perempuan dengan secara spesifik disebut sebagai Kelompok KRPL, dengan memberdayakan Kelompok KRPL pada kegiatan KRPL akan mampu memanfaatkan pekarangan rumah dan bisa meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengematan biaya belanja karena bahan makan yang di butuhkan sudah tersedia dipekarangan dan apabila hasil pekarangan sudah cukup untuk dirinya bisa dijual. Adapun upaya pemberdayaan yang diberikan Oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

a. Permodalan

Kegiatan KRPL merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Dalam pembentukan KRPL sendiri dibutuhkan modal yang relatif tidak sedikit, oleh sebab itu masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan yang pendapatannya relatif tergolong menengah kebawah dan belum melihat keberhasilan dari kegiatan akan tidak mau atau tidak mampu untuk memulai kegiatan. Pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melapas uang, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Kegiatan KRPL pada dasarnya hampir sama seperti industri kecil, yang membutuhkan bantuan modal relatif banyak dan keterbatasan modal akan menghambat kegiatan KRPL.



Modal yang dibutuhkan adalah modal asing atau pinjaman yang memiliki makna modal yang diperoleh dari pihak luar biasanya dalam bentuk pinjaman.

Pada dasarnya kegiatan KRPL diarahkan memang untuk mencukupi kebutuhan gizi masing-masing keluarga namun KRPL juga diarahkan pada pemenuhan pasar akan kebutuhan pangan sehingga bisa untuk membantu pendapatan keluarga. Namun permasalahan modal akan menjadi kelemahan dan hambatan tersendiri bagi perkembangan dan kelanjutan dari kegiatan KRPL itu sendiri.

Karena keterbatasan modal bisa menyebabkan pelaku KRPL tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau bahkan berhenti untuk melakukan kegiatan KRPL.

Upaya untuk menghadapi kelemahan yang dialami oleh Kelompok KRPL selaku pelaku kegiatan KRPL dalam keterbatasan modal yang bisa mengancam kegiatan KRPL, maka diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam hal ini sebagai pelaku pemberdaya yang dapat diwujudkan dengan memberikan fasilitas pemberdayaan. Pada dasarnya pemberdayaan menurut Kertasasmita (1996) dalam Mardikanto (2012:48) diartikan sebagai upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Fasilitas pemberdayaan untuk mewujudkan kegiatan pemberdayaan yaitu KRPL merupakan alternatif yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberi kekuatan pada pelaku KRPL.



Keterbatasan modal dari masyarakat desa sendiri dalam melaksanakan kegiatan KRPL menjadi hambatan tersendiri. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak berjalanya kegiatan yang dirancang guna memberdayakan masyarakat.

BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul selaku pemberdaya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Kebontunggul yang mengalami keterbatasan modal. Fasilitas pemberdayaan yang diberikan dilakukan dalam menghadapi keterbatasan modal, dilakukan dengan 2 tahap yaitu modal awal perintisan dan modal untuk pengembangan.

Fasilitas pemberdayaan melalui permodalan pada awal perintisan dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dengan memberikan modal non uang namun berbentuk kebun bibit desa untuk kebun Unggulan atau yang disebut sebagai *green house* juga memberikan bibit-bibit awal untuk percontohan dan beberapa hewan ternak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sumodiningrat dalam Marrdikanto dan Soebianto (2012:33) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan pemberian kesempatan atau memfasilitasi aksesibilitas terhadap sumber daya berupa modal.

Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan fasilitas pemberdayaan melalui Kelompok KRPL dan juga kelembagaan simpan pinjam untuk masyarakat desa misalnya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta beberapa koperasi-koperasi dibawah pemerintah desa. yang memungkinkan untuk memberikan kemudahan permodalan melalui partisipasi dari Kelompok KRPL itu sendiri. Hal tersebut dilakukan karena pihak pemerintah desa tidak



bisa dan masih belum memungkinkan untuk memberikan pinjaman modal secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah Desa Kebontunggul juga mengembangkan simpan pinjam untuk keanggotaan setiap organisasi sehingga sifat bunga bagi yang memperlakukan pinjaman 0% dan tanpa jaminan. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat desa dalam melakukan pinjaman sebagai modal kegiatan KRPL.

Berdasarkan hasil penelitian, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul selaku pemberdaya dalam kegiatan KRPL sudah berkontribusi dalam memberikan fasilitas pemberdayaan ketika pelaku kegiatan KRPL mengalami keterbatasan modal yang dilakukan dengan memberikan bantuan bangunan untuk pengembangan bibit serta beberpa bibit-bibit dan beberapa herwan ternak, kemudian juga memberikan kemudahan pinjam modal melalui kelompok-kelompok yang bergerak pada simpan pinjam yang bisa dimanfaatkan pelaku KRPL untuk melakukan pinjaman modal dimana syarat-syarat yang diperlukan tidak membebani bagi pelaku kegiatan KRPL itu sendiri. Namun pemberdayaan yang dilakukan masih belum merata disebabkan oleh keterbatasan dana yang ada pada beberapa organisasi yang menawarkan pinjaman karena bersifat simpan pinjam dan beberapa masyarakat yang masih sering tidak tepat waktu dalam membayarkan pinjamannya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti menginginkan kegiatan tersebut mampu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan, apalagi mengingat pentingnya dan betapa manfaat kegiatan tersebut apabila tetap dilaksanakan. Hal yang



mempengaruhi agar bisa tetap berkelanjutannya suatu kegiatan masyarakat adalah ketersediaan modal yang cukup. Fasilitas pemberdayaan yang sudah diberikan melalui peningkatan modal, diharapkan akan mampu untuk mengatasi setia permasalahan yang didapat para pelaku kegiatan KRPL. Dapat dikatakan bahwa BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul sudah berkontribusi secara strategis dalam menghadapi permasalahan keterbatasan modal bagi pelaku kegiatan KRPL. Fasilitas pemberdayaan yang sudah diberikan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dapat dianalisis dengan pendapat Sumodiningrat (1997:162) yang menyatakan bahwa, strategis pemberdayaan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pada dasarnya fasilitas pemberdayaan yang diberikan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dengan cara memberikan fasilitas permodalan berupa pembangunan dan pemberian bibit-bibit untuk modal awal kegiatan dan kemudahan akses peminjaman modal mampu untuk menciptakan suasana dan iklim yang mendukung potensi untuk berkembang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi ketidakberdayaan pelaku kegiatan KRPL, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul berperan memberikan fasilitas pemberdayaan kepada pelaku kegiatan KRPL berupa pembangunan dan pemberian bibit-bibit untuk modal awal kegiatan dan penguatan organisasi untuk kemudahan akses peminjaman modal. Akan tetapi pemberian modal



melalui penguatan organisasi masih belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat atau pelaku kegiatan KRPL. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya dana yang ada pada organisasi tersebut dan tidak ada sanksi yang tegas untuk membuat masyarakat yang melakukan pinjaman bisa tepat waktu dalam membayar pinjamanya.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang akan berpengaruh pada setiap kegiatan untuk masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

Strategi pengembangan SDM menurut Jons dalam Istiqomah (2016:2) mencakup pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen dan perubahan sistem.

Pengembangan SDM dinilai penting menurut Notoatmojo dalam Istiqomah (2016:1) disebabkan karena dengan pengembangan SDM akan meningkatkan

kemampuan profesionalisme, wawasan, kepemimpinan serta kepribadian seseorang. Apabila SDM tidak bisa memunculkan kreatifitas serta inovasi

dalam menunjang keberlanjutan suatu kegiatan maka akan menjadi kendala tersendiri bagi kegiatan tersebut. SDM yang berkompeten juga akan mampu

untuk melihat aspek keuntungan dari kegiatan yang dilakukan kemudian akan mencari cara bagaimana meningkatkan kegiatan agar kegiatan tersebut bisa

bermanfaat dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga kegiatan masyarakat tersebut tidak akan mengalami permasalahan terkait

keberlanjutannya dan mampu untuk lebih produktif. SDM merupakan faktor



yang sangat penting bagi kegiatan masyarakat yang dilakukan, dengan melihat pentingnya SDM sudah sepatutnya pemerintah memberikan fasilitas pemberdayaan guna mengembangkan SDM itu sendiri.

Kegiatan masyarakat menjadikan masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan tersebut, dengan SDM dari masyarakat merupakan salah-satu faktor penentu bagi keberhasilannya. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah pada masyarakat Desa Kebontunggul menjadikan kegiatan KRPL masih sangat terbatas pada bidang inovasi terkait dengan pengolahan produk KRPL itu sendiri. kemudian lemahnya kemampuan Kelompok Wanita Tani yang tergabung dalam Kelompok KRPL dalam menghadapi hambatan serta rendahnya kemampuan bersaing menjadikan kegiatan KRPL mengalami kemunduran di Desa Kebontunggul itu sendiri. Pada dasarnya kegiatan KRPL hampir sama seperti industr kecil yang sangat bergantung pada kualitas SDM. Mengingat orientasi dari kegiatan KRPL juga diarahkan pada peningkatan penghasilan. Permasalahan akan rendahnya SDM dalam kegiatan KRPL sesuai dengan hambatan dari industri kecil dikemukakan oleh Tambunan (2002:73) yang menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia.

Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Kelompok KRPL terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dapat diselesaikan melalui pemberian fasilitas pemberdayaan. Fasilitas pemberdayaan yang diberikan bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Ha tersebut sesuai dengan pendapat dari Sulistiyani



(2004:98) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui edukasi.

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh Mardikanto dan Soebianto

(2013:28) yang menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya memenuhi

kebutuhan yang diinginkan individu, maupun kelompok agar mereka memiliki

kemampuan dalam memenuhi keinginan-keinginan termasuk aksesibilitasnya

terhadap sumber daya terkait dengan pekerjaannya. Untuk itu dalam rangka

meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa diberikan fasilitas

pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan diberikan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur secara

langsung dengan menghadirkan beberapa peneliti yang terjun langsung

mendampingi masyarakat Desa Kebontunggul dalam melaksanakan KRPL.

Pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara sosialisasi untuk tahap awal

yang berguna untuk memahami masyarakat terkait pentingnya KRPL dan

menjelaskan pada masyarakat apa itu KRPL. Kemudian dilakukan pelatihan

dengan masyarakat bisa terjun langsung belajar bagaimana bertani, bagaimana

cara membuat bibit yang tepat, merawat hingga memanen serta bagaimana

mengolah produk hasil KRPL. Sedangkan dari Pemerintah Desa Kebontunggul

melalui pertemuan rutin bulanan untuk anggota KRPL berusaha mengarahkan

setiap anggota untuk berbagi pengetahuan, serta bekerjasama dengan

mahasiswa yang melakukan KKN di desa untuk ikut serta memberikan

pendidikan dan pelatihan berupa pemanfaatan teknologi atau mengajarkan

pengolahan hasil KRPL.



Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul merupakan bentuk penguatan keyakinan masyarakat serta dalam rangka merubah pola pikir masyarakat Desa Kebontunggul sesuai dengan tujuan kegiatan KRPL. Karena apabila tidak dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait kegiatan KRPL akan sulit untuk mengapai tujuan KRPL mengingat tingkat kemampuan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah. Diharapkan dengan pendidikan dan pelatihan SDM Kelompok KRPL akan lebih meningkat dan memiliki kekuatan serta kemampuan untuk melakukan inovasi sehingga kelangsungan kegiatan KRPL bisa terlaksana. Pada dasarnya peran BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok KRPL dapat dianalisis dengan pendapat yang disampaikan oleh Fahrudin (2011:75) yang menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran pemberdayaan antara lain:

- 1) Pelatihan dan bimbingan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan ilmu sosial, ekonomi, politik dan alam sekitar. Masyarakat desa lebih cenderung tertutup akan perkembangan teknologi yang ada, mereka cenderung bersikap sesuai dengan kebiasaan mereka, oleh sebab itu seringkali masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang masih kolot. Namun perkembangan jaman saat ini harus memaksa mereka untuk keluar dari zona aman dan nyaman menurut mereka, hal tersebut disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat apabila tidak berkembang maka akan sulit



untuk menyesuaikan diri. Oleh sebab itu guna menghadapi perkembangan jaman serta perubahan pola pikir masyarakat desa, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan serta upgrading kemampuan pada setiap pertemuan rutin kelompok KRPL. Hal tersebut dinilai berguna untuk menghadapi perkembangan jaman sehingga kualitas SDM mampu untuk menghadapi perkembangan ilmu sosial, ekonomi dan politik itu sendiri.

- 2) Pembelajaran dan pelatihan keterampilan fungsional yang relavan dengan kebutuhan dan potensi lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dengan menerjunkan beberapa pelatih yang secara langsung melakukan pendampingan terhadap Kelompok KRPL secara bertahap seperti pada masa pembibitan hingga pegolahan hasil KRPL. Kemudian Pemerintah Desa Kebontunggul melalui pertemuan rutin yang diadakan Kelompok KRPL mendatangkan beberapa mahasiswa serta orang yang ahli untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kelompok KRPL.

- 3) Pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu membawa suatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik. Dalam pelaksanaan kegiatan KRPL sendiri KelompokKRPL selaku pelaku kegiatan tidak bisa lepas akan menemukan beberpa persoalan, sehingga dibutuhkan kerjasama antara Kelompok KRPL dan BPTP Provinsi Jawa



Timur serta Pemerintah Desa Kebontunggul untuk berdiskusi memecahkan masalah tersebut, karena BPTP Provinsi hanya bertugas selama 2 Tahun melakukan pendampingan maka Pemerintah Desa yang masih berperan aktif dalam pembinaan dan pendidikan yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Misalkan dengan berkerjasama dengan BPTP Provinsi Jawa Timur untuk meminta solusi dan melakukan pengajuan proposal untuk permintaan bantuan. Atau dalam bentuk mendatangkan ahli yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan KRPL.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dalam meningkatkan SDM dengan memberikan fasilitas pemberdayaan melalui Pendidikan dan Pelatihan masih belum bisa dikatakan maksimal, dikarenakan faktor waktu yang diberikan BPTP Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pendampingan masih dinilai kurang, serta kemauan dari masyarakat Desa Kebontunggul untuk menekuni dan belajar mandiri setelah adanya pelatihan masih kurang. Sedangkan peran dari BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pemberdaya atau fasilitator sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat daya dan mengembangkan daya yang dimiliki Kelompok KRPL. Hal tersebut didukung dengan pendapat dari Sulistiyani (2004:83) yang menjelaskan bahwa tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inisiatif untuk mengantarkan kemandirian.



c. Pemasaran

Pemasaran menjadi sesuatu hal yang penting apabila suatu kegiatan masyarakat dibentuk dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Melalui pemasaran hasil produk dari kegiatan masyarakat bisa dikenal oleh masyarakat lainnya, dan disini akan terjadi proses jual beli yang nantinya akan menguntungkan bagi pelaku kegiatan masyarakat tersebut. Strategi pemasaran yang tepat akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, namun sebaliknya apabila strategi pemasaran tidak tepat atau lemah akan menyebabkan produk-produk akan kurang dikenal dan diminati oleh masyarakat sehingga akan menyebabkan kurangnya permintaan pasar atau masyarakat terhadap produk dari kegiatan tersebut. Dalam Kegiatan KRPL pemasaran juga menjadi faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan KRPL itu sendiri. Karena Kegiatan KRPL juga diarahkan untuk menambah pendapatan masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya Kegiatan KRPL diarahkan sebagai industri kelompok masyarakat atau perorangan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Kegiatan KRPL diarahkan sebagai penghasil produk sayur-sayur dan olahan hasil KRPL hampir sama dengan industri kecil. Karena memang diarahkan untuk dijadikan kegiatan jual beli, sehingga strategi pemasaran dipandang penting. Namun kemampuan pemasaran menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan KRPL, pemasaran memang merupakan kendala yang paling sering dialami oleh industri kecil termasuk kegiatan KRPL



yang diarahkan menjadi industri skala kecil. Hal tersebut sependapat dengan Tambunan (2002:73) yang menjelaskan bahwa hambatan yang sering dialami oleh industri kecil adalah lemahnya pemasaran. Kemudian akses masyarakat yang masih lemah terhadap peluang pemasaran serta kemampuan pemasaran yang terbatas juga menjadi hambatan tersendiri. Hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan Tambunan (2009:75) adalah kelemahan-kelemahan industri kecil yaitu lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses pemasaran seperti informais peluang dan cara memasarkan produk.

Melihat kelemahan pemasaran dan pentingnya pemasaran bagi kelangsungan kegiatan masyarakat yang diarahkan untuk menunjang pendapatan masyarakat, maka sangat diperlukan peran dari pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dalam hal ini melakukan pemberdayaan dengan memberikan fasilitas pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan pemasaran. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran yang akan berdampak pada kekuatan Kelompok KRPL dalam melakukan pemasaran produk hasil-hasil KRPL.

Permasalahan pemasaran yang terjadi pada kegiatan KRPL di Desa Kebontunggul disebabkan oleh masih rendahnya pemasaran itu sendiri. Kelompok KRPL hanya mengandalkan beberapa desa lain yang melakukan *studybanding* serta beberapa instansi yang memang menjadi langganan tetap



Kelompok KRPL Desa Kebontunggul. Dengan terbatasnya pemasaran yang dilakukan Kelompok KRPL sehingga menyebabkan masih rendahnya masyarakat yang menjadi konsumen produk-produk KRPL. Oleh karena itu pentingnya peran pemerintah untuk membantu meningkat pemasaran bagi kelompok KRPL. Terkait dengan rendahnya pemasaran BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul memberikan fasilitas pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan pemasaran kepada Kelompok KRPL.

Pemasaran yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur masih sangat terbatas hanya membantu pada bidang pengolahan yang berkualitas hingga bagaimana menarik konsumen melalui wadah yang menarik. Sehingga akan berdampak pada perbaikan kualitas yang membawa kepuasan konsumen. Sedangkan dari Pemerintah Desa Kebontunggul mencoba menggunakan teknologi berupa website untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Desa Kebontunggul yang didalamnya juga termasuk produk KRPL yang berguna untuk memberikan fasilitas agar produk-produk KRPL bisa dikenalesecara luas dan berakibat pada mudahnya mempromosikan produk KRPL. Namun masih belum pada tahap konsumen bisa membeli produk-produk tersebut secara online.

Berdasarkan hasil penelitian, BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul masih belum melaksanakan peranya secara maksimal dalam memberikan fasilitas pemberdayaan terkait dengan strategi pemasaran. Selama ini masih belum terjalin sistem yang baik terkait dengan



pemasaran KRPL, juga pengenalan melalui *event-event* yang akan membawa masyarakat luar mengenal produk KRPL juga masih belum ada. Kemudian inovasi terkait produk-produk yang dipasarkan juga masih belum terlihat sehingga minat masyarakat luar untuk membeli produk-produk KRPL dinilai masih rendah. Sedangkan fasilitas yang diberikan baik dari BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul hanya sebatas pada perbaikan kualitas sehingga mampu untuk dijual dan berusaha memanfaatkan teknologi namun masih terbatas kemampuan SDMnya sehingga masih belum tepat sasaran. Namun masih patut untuk diapresiasi karena mencoba sesuatu yang baru. Hal tersebut sebenarnya tidak buruk karena mampu untuk mempermudah pemasaran secara lebih meluas. Pada dasarnya pemerintah memiliki keajiban untuk mengembangkan potensi, pengembangan potensi bisa mengalami hambatan untuk itu diberikan fasilitas pemberdayaan yang berguna untuk memperkuat strategi pemasaran produk-produk unggulan yang ada.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Geografis yang Sesuai dengan Kegiatan KRPL

Kegiatan pertanian sangat bergantung pada kondisi alamiah yang mampu mendukung kegiatan pertanian itu sendiri. Sedangkan dalam kasus di Negara Indonesia penduduknya masih terkenal dengan mata pencaharian pertanian terutama pada masyarakat yang terletak di area pedesaan. Indonesia juga dikenal sebagai negara



agraris yang disebabkan oleh kondisi iklim dan geografis yang menunjang. Pada umum setiap macam tanaman bisa tumbuh di wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Zulkarnain (2009:1) bahwa pada umumnya isi kebun di Indonesia adalah berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman bumbu masak, tanaman obat-obatan, tanaman penghasil rempah-rempah yang disebut tanaman hortikultura yang dapat tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia. dengan keadaan geografis yang seperti itu kegiatan pertanian di Indonesia memang sangat bisa dijalankan.

Kegiatan KRPL sendiri merupakan upaya pemberdayaan yang diwujudkan berupa kegiatan dengan berbasis pada pertanian yang dilakukan pada pekarangan yang bisa menopang ketahanan pangan keluarga, namun Kegiatan KRPL juga mengarah pada pembentukan industri kecil sehingga mampu untuk menambah penghasilan keluarga. Pada dasarnya ketahanan pangan menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Inggrida (2014:5) bahwa masalah kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi masih cukup besar dan beragam antar provinsi dan kabupaten. Berdasarkan Peta Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan Indonesia pada tahun 2009 dari 346 kabupaten 100 diantaranya rentan terhadap kerawanan pangan. Untuk itu pemerintah membentuk suatu upaya pemberdayaan melalui kegiatan KRPL untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kondisi tanah Indonesia yang memang subur memang sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Lahan pekarangan rumah masyarakat juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga bisa menghasilkan lebih. Lahan pekarangan



menjadi sumberdaya yang potensial untuk menyediakan bahan-bahan pangan keluarga dan bisa bernilai ekonomi tinggi. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Kegiatan KRPL.

Kemudian Desa Kebontunggul menjadi desa pelaksanaanya. dipilihnya Desa

Kebontunggul sebagai pelaksanakan kegiatan KRPL dipengaruhi oleh kondisi geografis

Desa Kebontunggul yang mendukung. Kemudian penduduk desa juga mayoritas

bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga mampu untuk lebih cepat memahami

materi karena pada dasarnya kegiatan KRPL juga memang kegiatan pertanian namun

dalam lingkup yang lebih kecil. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna

menunjang kegiatan KRPL juga mudah ditemukan di Desa Kebontunggul. Misalkan

Air, pupuk, serta tanah yang subur. Karena letak Desa Kebontunggul terletak pada

wilayah yang cenderung dataran tinggi, yang memiliki tanah subur dan suhu udara

yang juga tidak panas. Sedangkan akses untuk mendapatkan air dipermudah dengan

adanya 2 sungai besar yang melintas pada wilayah Desa Kebontunggul itu sendiri.

Untuk pupuk, sebagian penduduk Desa Kebontunggul juga bermata pencaharian

sebagai peternak, sehingga tidak sulit untuk mencari pupuk yang terbuat dari kotoran

hewan.

Pada dasarnya salah satu faktor yang mendukung produktivitas kegiatan

masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah kemudahan kondisi

sehingg ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan mudah. Hal tersebut nantinya

akan berpengaruh pada berkurangnya modal yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut

serta kualitas dari produk kegiatan yang dihasilkan. Kegiatan KRPL juga serupa



dengan demikian, dengan mudahnya bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan seperti, air, tanah yang subur dan pupuk akan berpengaruh pada berkurangnya modal untuk kegiatan KRPL dan kualitas dari produk KRPL. Apabila kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan KRPL seperti air, tanah yang subur dan pupuk tidak tersedia, akan menyebabkan membekaknya pengeluaran kegiatan dan akan berimbas pada harga penjualan produk KRPL yang melambung tinggi sehingga megurangi antusias masyarakat yang nantinya akan membeli produk KRPL itu sendiri.

2) Desa Kebontunggul Menjadi Desa yang Sering Mendapatkan Kunjungan

Desa Kebontunggul mendapatkan predikat sebagai Desa yang sering mendapatkan kunjungan disebabkan oleh kemenangan Desa Kebontunggul menjadi desa terbaik pelaksanaan program PKK tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur.

Sehingga membawa dampak pada adanya desa lain yang melakukan *studybanding* di Desa Kebontunggul. Kemudian Desa Kebontunggul melalui pemerintah berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi pemberdayaan seperti program biogas hingga perancangan Desa Toga yang bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan dan beberapa perusahaan milik pemerintah serta swasta bahkan bebera perguruan tinggi. Atas usahanya tersebut pemerintah Desa Kebontunggul seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk mempelajari bagaimana kemajuan di Desa Kebontunggul dari desa lain.



Kegiatan-kegiatan perlombaan yang sering diikuti Desa Kebontunggul serta beberapa usaha-usaha inovasi menyebabkan terkenalnya Desa Kebontunggul yang akan membantu masyarakat luar untuk sekedar tau atau bahkan tertarik untuk membeli produk-produk Desa Kebontunggul tanpa susah-susah melakukan pemasaran. Sehingga memang dipandang penting partisipasi aktif pemerintah dan usaha inovasi yang akan nantinya berpengaruh pada perluasan jaringan Desa Kebontunggul itu sendiri. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sedarmayanti (2004:121) menyatakan bahwa peran pemerintah dimasa mendatang perlu diarahkan sebagai regulator dan fasilitator di point ke lima menyatakan bahwa merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kaulitas sumber daya manusia. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah harus cerdas untuk menciptakan inovasi guna untuk masyarakat selalu berinovasi dan kreatif.

Kegiatan KRPL merupakan kegiatan dengan perintis dari BPTP Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan pemerintah Desa Kebontunggul juga ikut serta secara aktif. Hal tersebut juga menyebabkan tugas dari BPTP Provinsi Jawa Timur dipermudah. Antusias pemerintah Desa Kebontunggul terkait dengan pembaharuan-pemabahruan ilmu pengetahuan memang patut untuk diberikan apresiasi. Hal tersebut sudah sewajarnya apabila Desa Kebontunggul menjadi salah satu Desa yang sering mendapatkan kunjungan untuk *studibanding* di Kabupaten Mojokerto.



b. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum partisipatif dan memiliki keahlian yang rendah

Keberhasilan suatu kegiatan juga dipengaruhi sasaran atau pelaku kegiatan tersebut. Masyarakat Desa merupakan Sumber Daya Manusia kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat desa yang berkualitas akan berpengaruh pada keberhasilan kegiatan karena SDM merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan yang menentukan keberhasilannya. Kondisi masyarakat desa yang memiliki keahlian rendah sangat mempengaruhi kegiatan karena masyarakat desa merupakan sumber daya manusia bahkan sumber daya utama. Masyarakat yang memiliki keahlian rendah bersikap untuk pasif terhadap perubahan atau bahkan menolak suatu perubahan serta masih membutuhkan bantuan dan dorongan secara terus menerus. Sehingga akan menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

Fasilitas pemberdayaan yang diberikan pemerintah masih belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat disebabkan masyarakat desa yang memiliki keahlian rendah sehingga lamban dan membutuhkan bantuan secara terus menerus dan terkadang apabila tidak adanya pengawasan mereka cenderung lepas tangan.

Disini apabila dibiarkan akan berakibat fatal pada motivasi serta antusiasme masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berguna pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. pada dasarnya setiap kegiatan yang memiliki tujuan pasti akan mengalami hambatan. Tak terkecuali juga kegiatan pemberdayaan. Dalam upaya pemberdayaan juga memiliki unsur-unsur yang menghambat upaya pemberdayaan.



Suhendra (2006:86) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan terdapat unsur-unsur terkandung yang dapat mempengaruhi kelancaran pemberdayaan sebagai berikut:

- a) Kemampuan politik yang mendukung
- b) Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara meyeluruh
- c) Motivasi
- d) Potensi masyarakat
- e) Peluang yang tersedia
- f) Kerelaan mengalihkan wewenang
- g) Perlindungan
- h) Awareness (kesadaran)

BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul juga menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat upaya pemberdayaan melalui Kegiatan KRPL. Hal tersebut mengancam keberlangsungan kegiatan KRPL dan kelancaran pemberdayaan itu sendiri. Beberapa masyarakat diketahui dengan tidak antusias terhadap kegiatan serta memiliki keahlian rendah. Hal tersebut akan berdampak pada keberlanjutan kegiatan KRPL serta kualitas hasil kegiatan itu sendiri.

2. Pemasaran Produk

Kegiatan KRPL pada dasarnya mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibada dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Pemasaran hasil dimaksudkan untuk menambah penghasilan masyarakat dengan mendistribusikan hasil-hasil KRPL itu sendiri. Pemasaran menjadi hal yang penting mengingat hal tersebut akan berpengaruh pada penambahan pendapatan masyarakat desa. Namun pemasaran bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Strategi pemasaran



yang tepat sangat diperlukan untuk proses transaksi masyarakat. Namun permasalahan pemasaran menjadi salah satu hambatan yang masih belum bisa dipecahkan sehingga menyebabkan kemunduran kegiatan KRPL di Desa Kebontunggul. Hambatan terkait dengan KRPL hampir serupa seperti yang dijelaskan oleh Tambunan (2002:73) terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil bahwa masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil antara lain masalah kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial, masalah keterbatasan sumber daya manusia dan masalah keterbatasan teknologi.

BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pemberdaya masih belum menemukan solusi terkait dengan hambatan pemasaran yang dirasakan Kelompok KRPL. Kemudian BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul hanya mengandalkan predikat Desa unggulan yang diteriam Desa Kebontunggul sehingga mampu menarik masyarakat dan bahkan pemerintah desa lain untuk melakukan studi banding sehingga bisa melakukan pemasaran produk-produk unggulan termasuk produk KRPL. Kemudian beberapa jaringan dari instansi-instansi pemerintahan untuk menjadi sasaran pemasaran produk. Sehingga pemasaran menjadi hambatan tersendiri bagi kegiatan KRPL di Desa Kebontunggul.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Kegiatan Kawasan Rumah

Pangan Lestari dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul. Hal tersebut

dilakukan untuk melakukan pemberdayaan sehingga masyarakat desa mampu

untuk melaksanakan kegiatan KRPL dan mengatasi beberapa hambatan yang

dialami ketika pelaksanaan. Adapaun upaya pemberdayaan yang diberikan

berupa pemberian fasilitas pemberdayaan itu sendiri, sebagai berikut:

a. Permodalan

Sebagai upaya pemberdayaan BPTP Provinsi Jawa Timur memberikan

fasilitas permodalan dengan memberikan bantuan pembuatan kebun bibit, dan

beberapa bibit sayur dan buah-buahan serta beberapa hewan ternak. Sedangkan

dari Pemerintah Desa Kebontunggul melalui kelembagaan keuangan mikro

desa dan kelembagaan Kelompok KRPL yang diarahkan pada simpan pinjam

sehingga mendorong peran aktif dari masyarakat itu sendiri dan

mempermudah jaminan peminjaman. Hal tersebut menguntungkan karena

pelaku KRPL tidak perlu melakukan pinjaman dengan jaminan dan bahkan



tidak mengharuskan membayar bunga yang tinggi layaknya di Bank konvensional.

b. Sumber Daya Manusia

Upaya pemberdayaan melalui kegiatan KRPL dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontungul melalui fasilitas pemberdayaan itu sendiri yaitu pendidikan dan pelatihan. BPTP Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan secara langsung yang masuk pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku KRPL. Sedangkan dari Pemerintah Desa Kebontungul bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan berupa mendatangkan beberapa ahli yang akan melakukan peningkatan kapasitas serta pemecahan masalah ketika pertemuan rutin bulanan kelompok KRPL berlangsung.

c. Kemampuan Pemasaran

Fasilitas pemberdayaan yang diberikan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontungul berkaitan dengan upaya pemberdayaan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu dengan memberikan informasi terkait kualitas produk dan terkait dengan pengemasan produk. Kemudian dengan mamerkan produk ketika perlombaan-perlombaan juga mengandalkan jaringan dari Pemerintah Desa Kebontungul karena sering mengikuti perlombaan dan memenangkan perlombaan. Pemerintah Desa Kebontungul juga melakukan inovasi



melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkenalkan produk unggulan Desa Kebontunggul termasuk produk-produk KRPL.

2. Upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, BPTP Provinsi dan Pemerintah Desa Kebontunggul dalam melaksanakan upaya tersebut memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul, antara lain:

- a. Faktor Pendukung

- 1) Kondisi Geografis yang Sesuai dengan Kegiatan KRPL

Kondisi geografis Desa Kebontunggul terletak di dataran tinggi dengan keadaan tanah yang subur, air yang tidak sulit serta suhu yang mendukung kegiatan pertanian. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan KRPL yang hampir sama dengan kegiatan pertanian pada umumnya. Hal tersebut mendukung upaya pemberdayaan yang memang difokuskan pada kegiatan KRPL itu sendiri. dengan kondisi geografis yang sesuai dengan kegiatan KRPL BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul tidak merasa kesusahan dan bahkan terbantu, seperti penghematan dana yang harus dikeluarkan karena kurangnya air atau keadaan tanah yang kurang subur sehingga memerlukan pupuk yang tidak sedikit.



2) Desa Kebontunggul Menjadi Desa yang Sering Mendapatkan Kunjungan

Desa Kebontunggul sebagai Desa yang sering dikunjungi membawa dampak yang baik berkaitan dengan pemasaran sebagai salah satu fasilitas pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh jaringan pemasaran yang bisa terjalin, misalkan beberapa instansi pemerintahan dan desa lain yang melakukan study banding. Pemasaran yang menjadi hal tersulit yang perlu dibenahi oleh BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul terbantu dengan jaringan pemasaran yang dibentuk karena Desa Kebontunggul yang menjadi salah satu desa rujukan untuk melakukan kunjungan *studybanding*.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum partisipatif dan memiliki keahlian yang rendah

Masyarakat desa merupakan pelaku sekaligus sasaran dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan rendahnya keahlian sumber daya manusia (SDM) menyebabkan kegiatan KRPL menjadi bermasalah. Masyarakat yang masih rendah keahliannya sebagian acuh terkait dengan kegiatan bahkan beberapa masyarakat melakukan. Sedangkan untuk masyarakat lain ikut serta kegiatan KRPL namun masih belum kreatif serta inovatif. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya semangat masyarakat lain untuk ikut serta dalam kegiatan serta untuk melanjutkan kegiatan KRPL itu sendiri.



2) Pemasaran Produk

Pemasaran produk merupakan hal yang penting bagi kegiatan yang dilakukan untuk menambah penghasilan masyarakat. Pemasaran menjadi faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya strategi pemasaran yang apik sehingga tujuan untuk menambah penghasilan tidak tercapai. BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil produk-produk KRPL. Usaha untuk memasarkan produk melalui sistem online juga terkendala terkait dengan SDM yang masih belum mumpuni.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan saran agar pemberdayaan yang dilakukan BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul dapat berjalan dengan maksimal dan mampu untuk memberikan solusi terkait dengan hambatan yang ditemukan. Adapun saran yang diutarakan oleh penulis untuk upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, antara lain:

1. Salah satu hambatan KRPL adalah rendahnya keahlian sumber daya manusia (SDM) serta adanya masyarakat yang masih belum tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan, sehingga diperlukan untuk meningkatkan intensitas masa pendampingan sehingga proses pemahaman dan perubahan pola pikir masyarakat bisa tercapai. Juga perlu untuk mempertimbangkan kembali waktu



yang tepat untuk melakukan pelatihan sehingga tidak mengganggu waktu produktif masyarakat sebagai sasaran.

2. Permasalahan pemasaran menyebabkan kegiatan KRPL yang diarahkan untuk menambah ekonomi tidak maksimal. Sehingga beberapa anggota tidak lagi antusias dalam melanjutkan Kegiatan KRPL. Untuk itu perlu inisiatif dari pelaku pemberdaya dalam hal ini BPTP Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontungul untuk meningkatkan motivasi masyarakat desa untuk tetap melaksanakan kegiatan KRPL. Misalkan dengan melakukan pameran produk-produk KRPL tiap akhir bulan dan mengadakan lomba KRPL dalam lingkup Desa Kebontungul saja. Hal tersebut akan mampu untuk memberikan apresiasi masyarakat pelaku KRPL itu sendiri dan bahkan untuk membantu memperkenalkan produk-produk KRPL.

3. Rendahnya Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemasaran tidak maksimal. Masyarakat masih belum menguasai teknologi. Untuk itu perlu pembentukan kerjasama antara Kelompok KRPL dan Kelompok Karang Taruna Desa Kebontungul berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pemerintah Desa Kebontungul, mengingat peran Pemerintah Desa sebagai perantara hubungan sesama kelompok. Peran Karang Taruna sebagai pengelola teknologi pemasaran berbasis online produk-produk KRPL sedangkan Kelompok KRPL sebagai pelaku yang memproduksi. Pengetahuan berkaitan dengan teknologi akan mampu secara cepat diserap oleh kelompok



pemuda karena sifatnya yang penuh penasarannya terkait sesuatu yang baru, dan kelompok pemudanya diwadahi melalui Karang Taruna itu sendiri.

4. Modal merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan kegiatan.

Adanya kendala permodalan yang minim yang disebabkan oleh beberapa masyarakat yang tidak membayar tepat waktu menyebabkan perputaran uang tidak setabil. Untuk itu Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai pembuat regulasi perlu menekankan dan menegaskan terkait sanksi dan aturan dalam peminjaman modal pada lembaga ekonomi produktif baik itu dari PUEM hingga Kelompok KRPL. Sehingga masyarakat yang meminjam dan sering membayar dengan telat mempunyai efek jera yang diakibatkan oleh sanksi yang jelas tertulis dalam regulasi.

5. Adanya beberapa masyarakat yang menolak bahkan membuat masyarakat yang lain juga ikut menolak menyebabkan penurunan jumlah anggota KRPL.

Peran Pemerintah Desa Kebontunggul dalam upaya melakukan mediasi dengan masyarakat desa sangat diperlukan. Pada masa itu akan terjadi proses diskusi untuk memahami kebutuhan masyarakat dan juga alasan kenapa masyarakat tidak tertarik bahkan cenderung untuk menolak adanya kegiatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Surabaya. BPS Provinsi Jawa Timur.

Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora

Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Dasar Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari. 2013

Mardikanto, Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. ALFABETA.

Miles, M.B Huberman, A.M, dan Saldana J. 2014 *Qualitative Data Analysis, A Methods Soercebook*. USA. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

M Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulsdi Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya. ITS Press.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. ALFABETA



Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung.

ALDABETA.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/HK.140/4/2015 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul Desa

Prasetyo, Indra Hadi. 2010. *Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang*. Malang. Skripsi Universitas Brawijaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebontunggul 2013-2019

Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. LaksBang Mediatama.

Rozaki, Abdur. Dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta. IRE Press

Sabtoni, Anang dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta. IRE Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.



Suryana, Siti. (2009). *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis Megister pada Universitas Sumatera Utara. (Online). repository.usu.ac.id.

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Barat

Tarigan1, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaringan Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Triadinda, Trisnawati. 2016. *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sebagai Wujud Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Studi di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*. Malang. Skripsi Universitas Brawijaya

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wijaya, Azmi. 2011. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskinn untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangka Pura)*. Malang. Skripsi Universitas Brawijaya.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek*. Malang. IKIP MALANG.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan KRPL Desa Kebontunggul





Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

1-2-2017	Saldo bulan lalu				171.000
		A'ah	57.000	7.000	
		Nila	50.000	10.000	216.000
25-2-2017	Terima angsuran	Tamah	10.000	2.000	216.000
		Rumiah			
		Anis			
		Jannah			
		B. Samud	10.000	4.000	300.000
		Panani	10.000	2.000	312.000
		Zahmah	10.000	2.000	327.000
		Kiamah	20.000	4.000	357.000
		Kahmah	20.000	4.000	387.000
		B. Lailah	20.000	4.000	391.000
		A'ah	50.000	10.000	441.000
		Mengembalikan uang ke Ayah			300.000
					141.000

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Kepala Desa Kebontunggul selaku pemerintah Desa Kebontunggul

1. Apa pentingnya pemberdayaan bagi pemerintah Desa Kebontunggul?
2. Mengapa kegiatan KRPL menjadi salah satu kegiatan yang dipilih sebagai upaya pemberdayaan?
3. Mengapa Desa Kebontunggul dipilih untuk melaksanakan kegiatan KRPL?
4. Upaya apa saja terkait pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Kebontunggul untuk melaksanakan KRPL?
5. Bagaimana sumber pendanaan KRPL?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui program KRPL?
7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung untuk pemberdayaan melalui program KRPL?

B. Wawancara dengan Peneliti BPTP Provinsi Jawa Timur

1. Apa makna dan sejarah tentang KRPL?
2. Apa hubungan BPTP dengan Kegiatan KRPL?
3. Bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan KRPL?
4. Fasilitas permodalan apa saja yang telah diberikan BPTP?



5. Bagaimana hambatan dari permodalan?
6. Fasilitas pengembangan sumber daya manusia yang seperti apa yang diberikan?
7. Berkaitan dengan pemasaran, pemberdayaan yang bagaimana yang telah dilakukan BPTP?
8. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KRPL?

C. Wawancara dengan Kelompok KRPL

1. Profil pengelola Kelompok KRPL desa Kebontunggul
2. Apa saja bantuan dari pemerintah desa Kebontunggul terkait dengan pemberdayaan melalui pelaksanaan KRPL?
3. Apakah ada bantuan dari luar pemerintah desa Kebontunggul dalam pelaksanaan KRPL?
4. Apa saja bantuan yang diberikan dari luar pemerintah Desa Kebontunggul?
5. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa Kebontunggul agar pelaksanaan KRPL terwujud?
6. Siapa saja aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan melalui KRPL ini?
7. Manfaat apa yang diperoleh setelah melakukan kegiatan KRPL ini?
8. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mencapai tujuan dari kegiatan KRPL?

